

MODEL PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PEDESAAN PARTISIPATIF



**BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERTANIAN
TAHUN 2000**



MODEL PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PEDESAAN PARTISIPATIF



**BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERTANIAN
TAHUN 2000**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan selesainya penulisan buku **Model Pengembangan Agribisnis Pedesaan Partisipatif** yang merupakan rangkuman pengalaman pelaksanaan program-program bantuan luar negeri di lapangan. Penyusunan buku ini merupakan bagian dari pelaksanaan Proyek Penataan Kelembagaan Pembangunan Agribisnis Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Buku Model Pengembangan Agribisnis Pedesaan Partisipatif ini disusun dengan maksud untuk turut memberikan sumbangan terhadap perkembangan agribisnis partisipatif pedesaan di Indonesia dalam bentuk sumbangan pengalaman lapangan dan konsep. Pengalaman lapangan yang dikaji dalam buku ini mencakup perkembangan agribisnis pedesaan di beberapa desa Kabupaten Rembang, Kabupaten Lebak dan Kotamadaya Cirebon.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka ikut berperan serta membangun sistem pertanian yang tangguh melalui pendekatan agribisnis pedesaan partisipatif.

Jakarta, Nopember 2000

Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri



DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| Bab I. Pendahuluan | 1 |
| Bab II. Konsep Agribisnis Pedesaan Partisipatif | 9 |
| Bab III. Pendekatan Model Farmer-Centered Agricultural Resource Management (FARM) Programme | 35 |
| Bab IV. Kajian Model Agribisnis | 39 |
| Bab V. Perkuatan Kelembagaan Agribisnis Pedesaan Partisipatif Mendatang | 58 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang terjadi saat ini dalam tata ekonomi dunia adalah liberalisasi perdagangan internasional yang dicirikan dengan disepakatinya perjanjian umum tarif dan perdagangan (GATT) pada putaran Uruguay serta terbentuknya organisasi perdagangan dunia (WTO). Arus globalisasi dunia ini cenderung menghilangkan batas-batas wilayah negara, dimana segala perpindahan barang dan informasi antar negara sudah sulit dihambat masuk. Hal ini merupakan tantangan utama dalam upaya membangun perekonomian, khususnya bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya bercirikan usaha skala kecil, pemanfaatan teknologi padat karya dan kualitas sumber daya manusia rendah.

Perdagangan bebas antar negara diikuti dengan upaya menghilangkan segala hambatan (barriers), sehingga arus barang, faktor produksi, dan informasi bisa lebih leluasa keluar masuk antar negara. Perubahan karakter perdagangan saat ini akan merubah cara pandang terhadap perilaku pasar, baik pasar domestik maupun pasar luar negeri. Pendekatan produk dalam strategi pemasaran yang pernah dianut banyak pelaku pasar telah mulai ditinggalkan. Pendekatan pasar banyak dianut dan

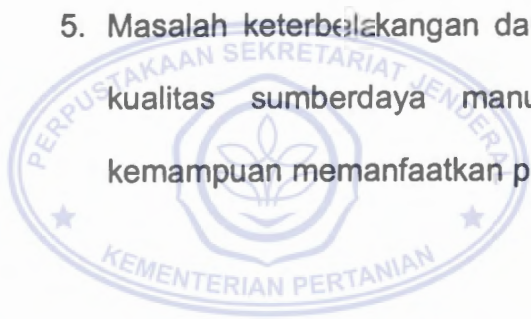


lebih cocok untuk kondisi ini. Dengan demikian pengembangan produk dan pola pemasaran akan mengacu pada perilaku permintaan (demand driven).

Dalam menghadapi pelaksanaan perjanjian umum GATT, kesepakatan pembentukan AFTA dan kerjasama ekonomi dalam APEC, Indonesia perlu melakukan upaya dalam meningkatkan daya saing, ketahanan nasional serta efisiensi alokasi sumberdaya.

Beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi perdagangan global, antara lain adalah:

1. Masalah yang berkaitan dengan proses dan dampak transformasi struktural perekonomian nasional dari agraris ke industri serta transformasi sosial dari masyarakat tradisional kearah struktur yang berciri modern.
2. Masalah kesenjangan sosial dan ekonomi maupun kesenjangan antar wilayah yang jika tidak dicermati akan menimbulkan kerawanan pada ketahanan nasional.
3. Masalah yang menyangkut hubungan kerjasama antar kekuatan ekonomi yang berbeda, antara kewenangan pusat dan daerah, kerjasama bilateral maupun multilateral.
4. Masalah yang berkaitan dengan kelangkaan dan keterbatasan sumberdaya, penetapan alokasi dan mekanismenya, dan upaya untuk memobilisasinya.
5. Masalah keterbelakangan dan kemiskinan yang menyangkut rendahnya kualitas sumberdaya manusia, keterpencilan lokasi, keterbatasan kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi dan minimnya infrastruktur.

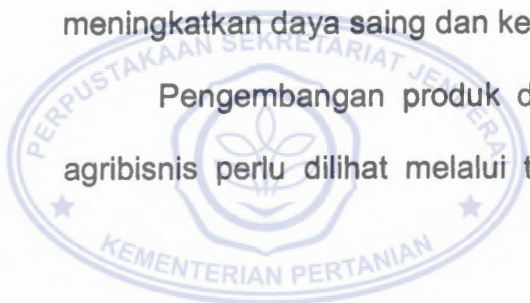


Begitu pula permasalahan yang ada dalam pengelolaan produksi, proseding dan pemasaran komoditas pertanian, yang umumnya dicirikan oleh berbagai kelemahan antara lain : panjangnya mata rantai pemasaran, sifat produk mudah rusak, volume besar (perishable and bulky), miskin diversifikasi produk, masih rendahnya pemanfaatan teknologi transportasi dan pengepakan, dan pola manajemen produk masih tidak dapat mengatasi adanya sifat produksi musiman. Semua kelemahan diatas membuat posisi adu tawar (bargaining position) para pelaku agribisnis (khususnya petani) menjadi sangat lemah.

Mata rantai pemasaran produk pertanian yang panjang dari petani produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar sampai ke konsumen akan berakibat kepada kecilnya keuntungan yang diperoleh petani produsen dan konsumen membayar lebih mahal. Akibatnya biaya pemasaran (marketing cost) dari produsen ke konsumen cukup tinggi.

Pengelolaan pemasaran produk pertanian membutuhkan investasi dari pemerintah maupun swasta dalam melakukan rekayasa ekonomi, sosial dan tehnik (Saefuddin, 1986 :44). Untuk hal tersebut diperlukan pengembangan kemitraan antar pelaku pembangunan yaitu pemerintah, pengusaha swasta, BUMN, koperasi, lembaga swadaya masyarakat dan donor internasional dalam upaya mengatasi berbagai persoalan pembangunan serta upaya meningkatkan daya saing dan ketahanan nasional di era globalisasi.

Pengembangan produk dan pemasaran dengan pendekatan sistem agribisnis perlu dilihat melalui tiga hal (Badan Agribisnis, 2000:2), yaitu :



Pertama dari sisi permintaan, berkaitan dengan kemampuan dan kecepatan pengembangan produk kearah produk-produk pertanian yang sangat tinggi elastisitas pendapatannya dan berkualitas ekspor. *Kedua* berkaitan dengan transformasi tenaga kerja, yaitu kecepatan realokasi tenaga kerja antar sektor agar dapat mengakomodasi perbedaan laju pertumbuhan antar sektor, sehingga tenaga kerja disektor pertanian mendapatkan nilai tambah yang seimbang dengan sektor lain. *Ketiga* berkaitan dengan transformasi struktural, yaitu kemampuan mentransformasikan pertanian secara tradisional dan berorientasi pada produksi menuju suatu sistem agribisnis yang berorientasi pasar. Dengan demikian, pengembangan agribisnis perlu memanfaatkan mekanisme pasar yang dinamis guna menjadikan iklim perdagangan komoditi pertanian yang lebih baik. Dengan demikian porsi margin setiap pelaku lebih proporsional sesuai peran masing-masing, terutama bagi produsen.

Pengembangan pasar dan tataniaga produk pertanian berkaitan dengan simpul-simpul proses pemasaran (khususnya kelembagaan perdagangan partai besar), pengolahan produk dan pengembangan pasar untuk produk berkualitas serta jaringan suplai yang kontinyu dan sistematis dari tingkat petani.

Dalam rangka menghadapi tantangan serta memecahkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dikembangkan suatu model agribisnis pedesaan partisipatif yang akan mendukung suplai produk pertanian berkualitas, berkelanjutan dan profesional dalam pengelolaannya

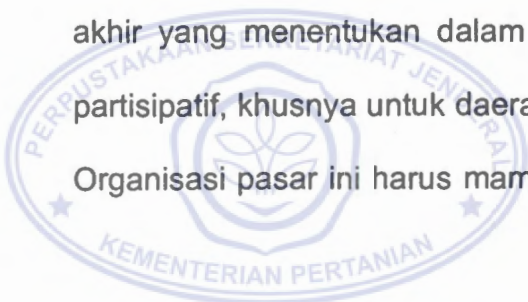
serta diperlukan adanya lembaga pemasaran produk pertanian yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- (a) melindungi kepentingan petani dengan cara memperpendek rantai pemasaran dan menumbuhkan koperasi pemasaran,
- (b) meningkatkan nilai produk melalui perbaikan dalam grading, packaging (pengemasan), dan penanganan fisik lainnya,
- (c) memperkenalkan sistem lelang melalui transaksi grosir yang terkonsentrasi dan penawaran terbuka,
- (d) menstabilkan harga pasar dengan cara memperkuat pelayanan terhadap produsen dan memperbaiki fungsi assembling dan distribusi, serta
- (e) memberi pelayanan yang lebih baik kepada konsumen melalui peningkatan jumlah supermarket dan penentuan harga komoditas secara adil.

Lembaga pemasaran produk pertanian ini diharapkan dapat : a) Menjamin komoditas yang dihasilkan produsen dapat dipasarkan, b) Tetap memberi peran aktif bagi pedagang pengumpul/perantara di setiap tingkatan pengembangan ekonomi, dan c) Mengembangkan keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lain, transportasi, pengolahan hasil/ penyimpanan dan sistem informasi .

Keberadaan lembaga pemasaran produk pertanian merupakan titik akhir yang menentukan dalam pengembangan model agribisnis pedesaan partisipatif, khususnya untuk daerah-daerah berlahan marginal (seperti rainfed).

Organisasi pasar ini harus mampu mengakomodasi segenap kebutuhan dan



kepentingan pelaku agribisnis secara nyaman, bersih, kompetitif dan berkualitas termasuk :

- a. Memberikan kepastian pasokan, harga, kualitas dan lain-lain bagi pelaku agribisnis termasuk produsen, perantara maupun konsumen.
- b. Memberikan kenyamanan bagi produsen dan konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi bisnis tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi tertentu untuk memperoleh keuntungan.
- c. Memberikan kesempatan pelaku agribisnis untuk mengikuti berbagai program pelatihan yang diwarkan oleh pengelola lembaga pemasaran secara berkala.
- d. Memberikan kesempatan pelaku agribisnis untuk ikut serta dalam kegiatan magang untuk menambah pengalaman agribisnisnya.
- e. Memungkinkan terjadinya proses pembentukan harga yang lebih terbuka dan transparan karena posisi tawar masing-masing pelaku cukup tinggi.
- f. Memberikan berbagai kemudahan melalui tersedianya berbagai fasilitas bisnis termasuk fasilitas perbankan, transportasi, ekspor-impor, koperasi, ruang pertemuan, penginapan, ruang penyimpanan/pendingin, pergudangan, pelatihan dan lainnya.
- g. Tersedianya pusat informasi pasar yang mampu memberikan informasi teknis untuk membantu pelaku agribisnis menyesuaikan bentuk dan proses transaksi.



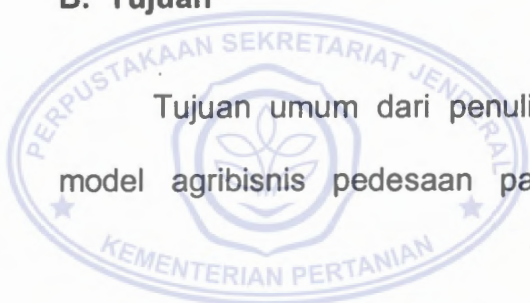
Rekayasa ekonomi, sosial dan budaya dalam pengembangan model agribisnis pedesaan partisipatif ini akan menggunakan metode pendekatan dan pengalaman lapangan dari program Farmer-centred Agricultural Resource Management (FARM) yang mendapat dukungan teknis dari Food and Agricultural Organization (FAO) dan bantuan dana dari United Nation for Development Program (UNDP). Model pendekatan lain akan digunakan sebagai suatu rujukan dan literatur tambahan untuk mendukung konsep pengembangan ini.

Program FARM dilaksanakan secara regional untuk Asia dan Pasifik di Indonesia, China, Philipina, Thailand, Srilanka, Nepal, Vietnam dan India sejak tahun 1995. Indonesia telah mengimplentasikan konsep FARM ini pada beberapa pilot site, diantaranya : Kabupaten Rembang Jawa Tengah), Lebak, Cirebon dan Majalengka (Jawa Barat) serta di beberapa daerah lainnya secara swadana.

Pengembangan model agribisnis pedesaan partisipatif ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah lahan kering (rainfed area), dimana Indonesia memiliki lahan lebih dari 11 juta hektar dan tinggal masyarakat yang pada umumnya berpenghasilan rendah.

B. Tujuan

Tujuan umum dari penulisan ini adalah ingin menganalisis model-model agribisnis pedesaan partisipatif yang telah dikembangkan oleh



Program Farmer-centred Agricultural Resource Management (FARM) dan program lainnya untuk mendapatkan model pengembangan yang baik dan dapat disebar-luaskan ke daerah lainnya sesuai dengan kondisi spesifik daerah.

C. Manfaat Kajian

Hasil kajian ini akan berguna sebagai salah satu bahan masukan untuk :

1. Pengambil kebijakan dan para pakar bidang pertanian dalam menetapkan kebijakan pengembangan agribisnis pedesaan secara partisipatif, khususnya dilahan kering.
2. Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan sistem pengelolaan pemasaran produk pertanian dan jaringan suplai dari tingkat petani.
3. Mendorong kemampuan masyarakat tani dalam memproduksi dan memasarkan produk pada konsumen domestik maupun internasional melalui sistem kelembagaan agribisnis.
4. Penyusun konsep-konsep pendekatan agribisnis pedesaan dan pembangunan partisipatif.
5. Khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan dan sistim tataniaga pertanian di Indonesia.
6. Untuk dasar-dasar bagi pengkajian selanjutnya.



BAB II

KONSEP AGRIBISNIS PEDESAAN PARTISIPATIF

Sejalan dengan semakin derasnya arus globalisasi yang menyebabkan pasar internasional bagi produk-produk pertanian semakin terbuka dan tingkat persaingan di pasaran internasional semakin ketat, tuntutan terhadap pengembangan kualitas dan kuantitas produk-produk pertanian di Indonesia dirasakan semakin mendesak. Salah satu syarat agar produk-produk pertanian Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk sejenis dari negara lain adalah efisiensi yang tinggi dalam mengusahakan komoditi yang bersangkutan, dengan kualitas hasil yang sesuai dengan tuntutan pasar. Untuk itu diperlukan adanya strategi dasar yang dapat mendorong terjadinya alokasi sumber daya secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi.

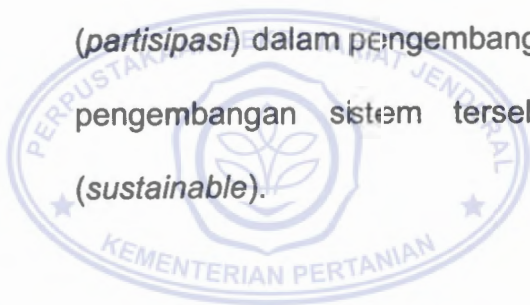
Pengembangan sistem agribisnis membawa perubahan pada strategi pembangunan pertanian di Indonesia dari pendekatan yang berorientasi pada produksi (*production-oriented*) ke pendekatan yang berorientasi bisnis (*agricultural business oriented*). Hal ini merupakan satu pilihan yang tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Agribisnis dalam struktur perekonomian merupakan perekat bidang tanggung antara sektor pertanian dan sektor lainnya, sehingga dimungkinkan untuk mengalokasikan sumberdaya secara efisien.

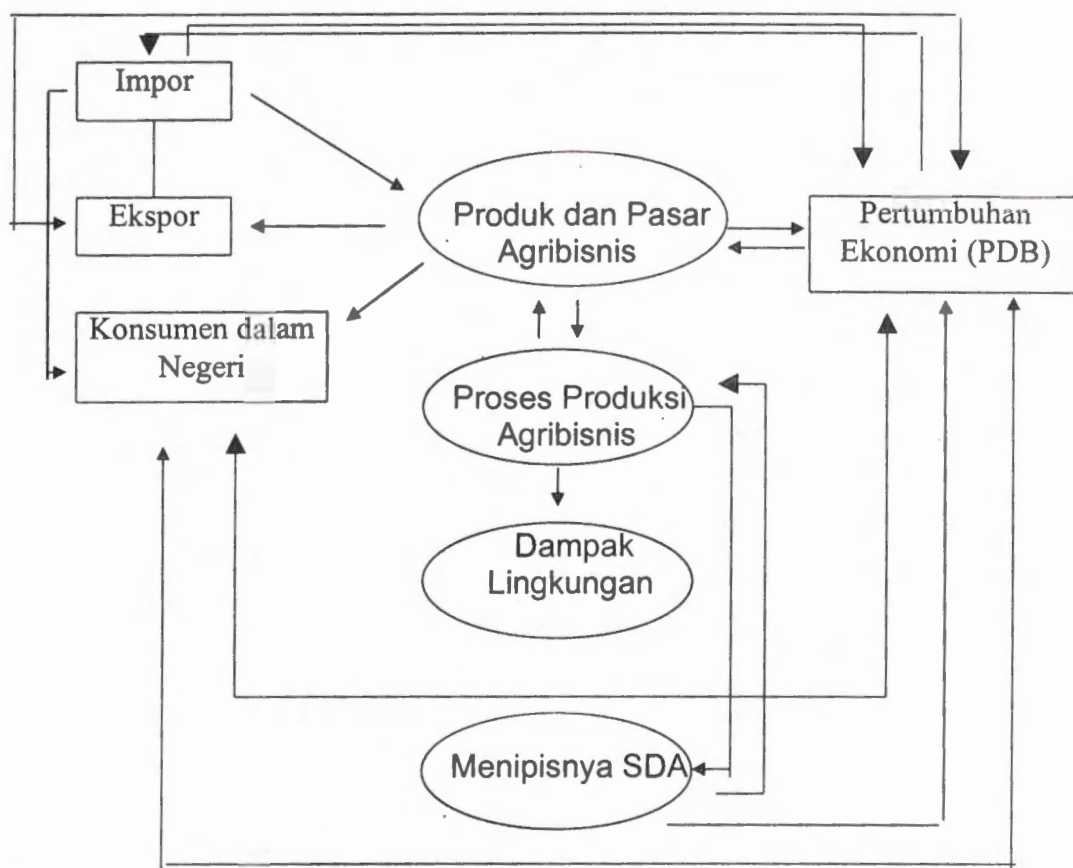


2. Suatu komoditi dapat dikelola secara efisien dengan kualitas (segar maupun olahan) cukup tinggi, sehingga produk tersebut dapat kompetitif di pasar.
3. Dengan kegiatan yang saling berantai (mencakup penyediaan sarana produksi, usaha tani, pengolahan hasil, dan pemasaran) maka agribisnis akan meningkatkan nilai tambah komoditi yang dihasilkan, sehingga merupakan peluang bagi petani untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi.
4. Agribisnis menyangkut berbagai aspek yang dapat menumbuhkan kegiatan yang saling terkait, sehingga dengan rekayasa pengembangan yang tepat kegiatan agribisnis berpotensi besar untuk menampung tenaga kerja yang lebih banyak atau bahkan mendorong terciptanya kesempatan kerja baru.

Agar dapat memberikan dampak nyata dan dapat dirasakan masyarakat petani, pembangunan agribisnis hendaknya berpusat di daerah pedesaan. Sehingga pembangunan agrobasis industri menengah/kecil akan berorientasi ke pedesaan pula; Dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mampu memperkecil jumlah rakyat miskin yang umumnya berada di daerah pedesaan. Untuk itu, masyarakat tani di pedesaan perlu didorong untuk secara aktif berperan serta (*partisipasi*) dalam pengembangan sistem agribisnis di daerahnya, sehingga pengembangan sistem tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*).

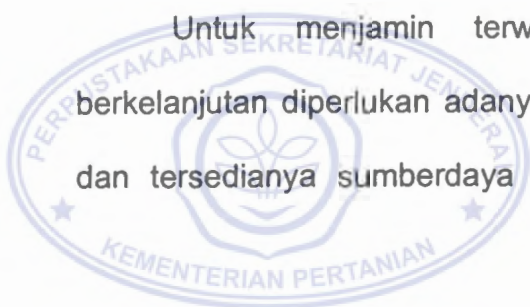


Kegiatan agribisnis yang berkelanjutan merupakan sasaran strategi pembangunan karena merupakan bagian dari pembangunan perekonomian secara keseluruhan yang dikehendaki seluruh bangsa. Hubungan antara sistem agribisnis berkelanjutan dengan perekonomian secara keseluruhan (PDB) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan antara Kegiatan Agribisnis dan Pembangunan Berkelanjutan.

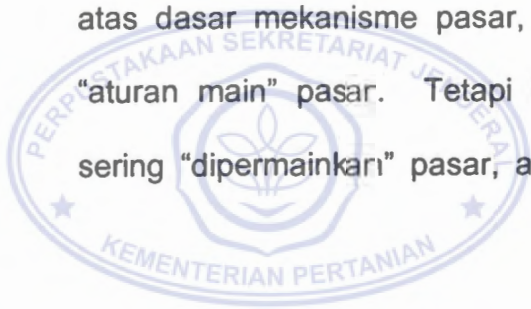
Untuk menjamin terwujudnya suatu sistem agribisnis yang berkelanjutan diperlukan adanya partisipasi sumberdaya manusia pertanian dan tersedianya sumberdaya alam pertanian secara berkesinambungan.



Dalam hal ini konsep agribisnis partisipatif menjadi sangat penting karena merupakan kunci bagi terwujudnya suatu sistem yang berkelanjutan (*sustainable*). Untuk lebih memahami konsep agribisnis partisipatif tersebut berikut ini akan dibahas secara terpisah makna dari kata agribisnis dan partisipatif.

2.1. Agribisnis Pedesaan

Agribisnis pada dasarnya adalah sosok pertanian modern yang diejawantahkan sebagai perusahaan pertanian yang berkarakter (berwatak) bisnis, dimana pelakunya secara konsisten berupaya untuk meraih nilai tambah komersial dan finansial yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam mengusahakan pemanfaatan proses biologik dari tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat (pasar). Sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian, sistem agribisnis sebaiknya berada di dan menjadi bagian dari masyarakat pedesaan. Namun tidak seperti yang dicerminkan oleh pertanian tradisional yang berorientasi subsistensi, para agribisnis merupakan bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkannya serta yang menyerap segala sesuatu yang dihasilkannya. Sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global yang bekerja atas dasar mekanisme pasar, agribisnis bekerja dengan merujuk kepada "aturan main" pasar. Tetapi berbeda dengan pertanian tradisional yang sering "dipermainkan" pasar, agribisnis mengambil posisi sebagai "pemain

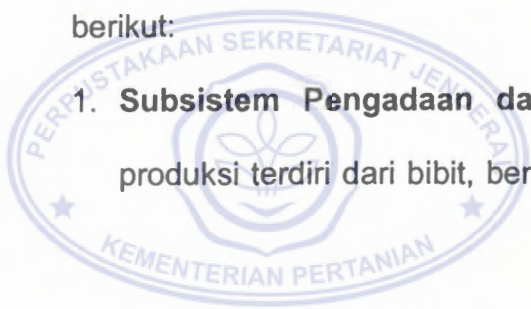


aktif" dari pasar. Bermain aktif di pasar berarti harus mampu menawarkan produk yang "bersaing" dalam kualitas, harga, pelayanan, dan lain-lain. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa bila ingin meraih "nilai tambah", pelaku agribisnis harus mengamalkan beberapa "nilai instrumental" dalam menyelenggarakan usahanya, yaitu nilai instrumental yang berupa produktivitas, konsistensi, disiplin, lugas, efisiensi, hemat, profesional, optimal, luwes, dinamik, dan ketepatan (guna, cara, jenis, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga).

Agribisnis didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas mulai dari pengadaan sarana produksi pertanian sampai pada tataniaga produk pertanian yang dihasilkan oleh usaha tani atau olahannya. Pengertian tersebut mencakup tiga sektor yang saling tergantung secara ekonomis yaitu sektor masukan (input), sektor produksi (farm), dan sektor keluaran (output). Yang termasuk dalam sektor input adalah bibit, makanan ternak, pupuk, mesin pertanian dan sebagainya. Usaha tani (farm) merupakan sektor agribisnis yang memproduksi hasil tanaman dan hasil ternak. Sedangkan sektor output memproses dan menyalurkannya kepada konsumen.

Secara konseptual dapat dikatakan bahwa sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem sebagai berikut:

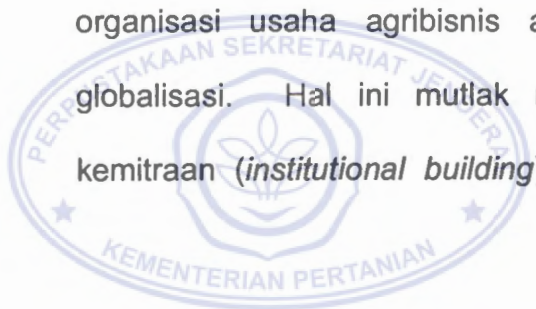
1. **Subsistem Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi.** Sarana produksi terdiri dari bibit, benih, pupuk, obat-obatan, kredit, bahan bakar,



alat dan mesin pertanian, dan sebagainya. Kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini dilakukan oleh perorangan, pengusaha swasta, koperasi, dan lembaga pemerintah.

2. **Subsistem usaha tani atau produksi pertanian (Agronomi).** Melalui proses biologi dari tanaman dan hewan, usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga dan tanaman hias, hasil ternak, dan hewan. Pelaku dalam subsistem ini adalah produsen-produsen yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha perkebunan, dan lain-lain.
3. **Subsistem Pengolahan dan Tataniaga Hasil Pertanian (Agroindustri dan Agroniaga).** Merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk pertanian, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Sebagian dari produk yang dihasilkan didistribusikan langsung pada konsumen di dalam atau luar negeri, sebagian lain mengalami pengolahan lebih dahulu baru kemudian didistribusikan kepada konsumen. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini meliputi pengumpul produk, pengolah produk, pedagang dan penyalur.

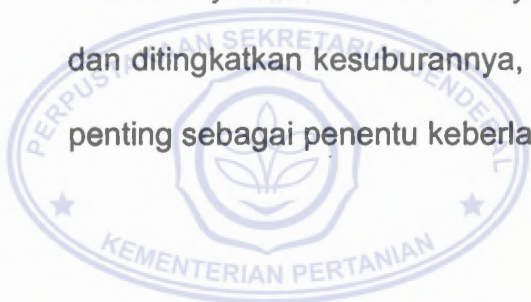
Agribisnis sebagai suatu sistem yang kompleks diharapkan dapat tumbuh dan berkembang terutama di pedesaan, yang proses adaptasinya terhadap tantangan globalisasi menghendaki inovasi perekayasaan organisasi usaha agribisnis agar lebih kompetitif dalam menghadapi globalisasi. Hal ini mutlak memerlukan pengembangan kelembagaan kemitraan (*institutional building*) dalam sistem kerjasama kemitraan yang



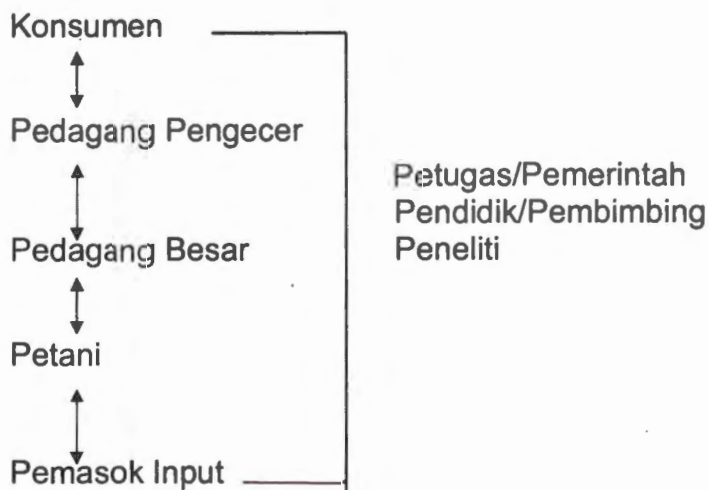
menjanjikan terwujudnya sistem produksi dalam skala optimal dan manajemen terpadu dari berbagai subsistem yang menjadi komponen dari agribisnis itu. Dalam rangka upaya untuk mendorong tumbuhnya sistem agribisnis berskala besar yang ditopang organisasi petani yang handal, pengusaha yang profesional, di didukung dengan berkembangnya manajemen agribisnis yang menampilkan sosok hubungan kemitraan yang harmonis, diperlukan kehadiran profesi perekayasa agribisnis di pedesaan, pengusaha yang berwawasan pejuang agribisnis dan petani yang tangguh.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, satu diantaranya adalah perlu dilakukan rekayasa kelembagaan pertanian pada tingkat lokalita. Sehingga diharapkan terjadi percepatan rekayasa kelembagaan pertanian dalam mengimbangi kecepatan tumbuh dan berkembangnya agroindustri, terutama dalam menangkai signal-signal pasar. Selain itu, kelembagaan pertanian dapat menyediakan bahan mentah dalam kuantitas, kualitas, kualifikasi dan waktu yang sesuai dengan permintaan pasar (agroindustri). Pada gilirannya, kelembagaan agribisnis pedesaan pertanian diharapkan akan dapat melakukan redistribusi manfaat ekonomi yang timbul sebagai akibat peningkatan efisiensi dan peningkatan kaitan fungsional dengan agroindustri; sehingga akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Keberlanjutan kegiatan agribisnis sangat bergantung pada sumberdaya alam. Sumberdaya alam tersebut apabila tidak dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, maka akan kehilangan karakteristiknya yang penting sebagai penentu keberlanjutan agribisnis.



Sistem agribisnis yang terdiri dari beberapa sistem yang saling terkait dan terpadu tersebut hanya dapat berhasil jika struktur vertikal dan koordinator yang ada di dalam sistem tersebut berfungsi secara baik dalam menjembatani setiap langkah kegiatan pertanian, mulai dari tingkat pemasok kebutuhan pertanian sampai ke tingkat konsumen. Struktur vertikal dan koordinator tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Vertikal dan Koordinator Agribisnis

Dalam proses perkembangannya, pembangunan sistem agribisnis di Indonesia masih menghadapi banyak kendala yang mencakup masalah transportasi dan prasarana lainnya yang menunjang kelancaran proses tataniaga agribisnis, masalah pemasaran atau tataniaganya itu sendiri, masalah skala usaha, masalah teknologi, masalah tenaga profesional, dan



yang klasik adalah masalah finansial. Secara lebih terperinci, masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masalah Pemasaran

Produk-produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing di pasaran ekspor karena kualitas yang masih rendah, harga produk hasil industri pengolahan yang terlalu tinggi akibat masih tingginya biaya produksi dan biaya pemasaran masih merupakan kendala utama dalam memasarkan produk-produk agribisnis Indonesia.

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Kurangnya sarana transportasi dan informasi masih menjadi kendala utama bagi pengembangan agribisnis di pedesaan, khususnya di luar Jawa baik untuk mempermudah distribusi hasil industri olahan maupun bahan baku yang mengakibatkan tingginya biaya per unit barang.

3. Kelembagaan

Agribisnis yang berkembang sekarang ini adalah sebagai akibat dari kepedulian semua pihak yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangannya. Di bidang penyediaan bahan baku, Departemen Pertanian dan Kehutanan yang membina perkembangannya; dan di bidang pengolahan/prospecting Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membinanya. Oleh karena itu kerjasama tiga Departemen ini harus jelas dari tingkat atas sampai tingkat bawah.



4. Skala Usaha

Kegiatan pertanian di pedesaan belum memberikan dukungan yang optimal karena pada sebagian besar pola produksi komoditi pertanian belum dalam satu areal yang kompak berkelompok sehingga skala ekonomi daerah belum efisien.

5. Pola Industri Pengolahan Hasil Pertanian

Masih banyak industri pengolahan pertanian yang terpusat belum pada sentra produksi pertanian di pedesaan tetapi malah di perkotaan sehingga biaya transportasi relatif tinggi.

6. Teknologi

Produktivitas dan kualitas rendah seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan teknologi.

7. Sumberdaya Manusia

Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas dan kualitas produk agribisnis Indonesia.

8. Permodalan

Secara mikro kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal.

9. Pemasaran

Dalam hal-hal tertentu, walaupun pasar untuk agribisnis masih luas, namun dalam praktek sering pula dijumpai adanya kesulitan memasarkan hasil pertanian. Mulai dari kurangnya kualitas, packaging dan labelling

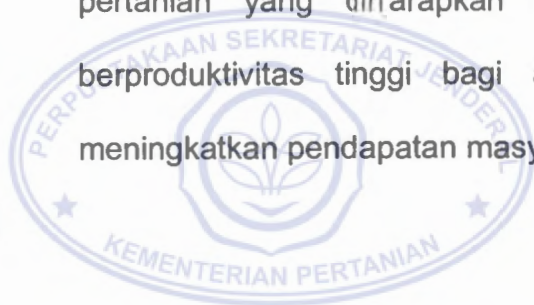


yang kurang menarik sampai pada kurangnya informasi pasar adalah penyebab klasik dari kurang efisiennya pemasaran.

Strategi pengembangan sistem agribisnis terpadu yang berkelanjutan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan keterkaitan fungsional antar subsistem sehingga setiap kegiatan pada masing-masing subsistem dapat berlangsung berkesinambungan dengan efisiensi tinggi. Hal ini berarti bahwa pola pemanfaatan sumberdaya alam, modal, maupun sumberdaya manusia harus efisien dan optimal pada setiap simpul kegiatan dan selalu mengacu pada mekanisme pasar. Pada tiap tahapan agribisnis harus mampu mendistribusikan insentif kepada pelaku yang terlibat secara proporsional sesuai dengan masukannya. Hanya dengan penciptaan sistem insentif yang adil maka keseluruhan sistem agribisnis ini dapat berlangsung secara terlanjutkan.

Kedua, pembangunan agribisnis harus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan. Adanya kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang cepat di pedesaan serta rendahnya pertumbuhan sektor non pertanian di pedesaan telah melahirkan permasalahan dan kesenjangan sosial ekonomi antar daerah dan antara desa dengan kota. Agribisnis merupakan perpanjangan dan perluasan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja berproduktivitas tinggi bagi angkatan kerja pedesaan dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.



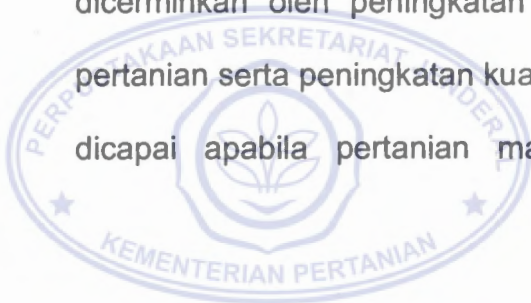
Ketiga, pengembangan agribisnis harus diarahkan pada pengembangan mitra usaha skala besar dan skala kecil secara serasi, sehingga nilai tambah agribisnis dapat dinikmati secara adil oleh seluruh pelakunya. Sektor produksi pertanian di Indonesia dicirikan oleh skala usaha kecil. Dengan demikian pengembangan agribisnis skala besar harus mampu menarik usaha skala kecil dalam satu konsep ketergantungan yang saling menguntungkan.

Kebijaksanaan untuk menunjang strategi di atas dalam banyak hal memerlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai instansi. Dalam hal ini Departemen Pertanian sebagai pemrakarsa, bersama dengan Departemen terkait agar berupaya menciptakan kondisi obyektif yang kondusif bagi pengembangan agroindustri dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

Kebijaksanaan umum pembangunan agribisnis yang perlu mendapat perhatian lebih mendalam mencakup: (1) kebijaksanaan pengembangan sumberdaya manusia, (2) kebijaksanaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan, dan (3) kebijaksanaan pembangunan pertanian wilayah.

Sumberdaya manusia pertanian terdiri dari para petani, pekebun, peternak dan nelayan; aparat pembina di pusat dan daerah yang terdiri dari perencana, pelaksana, peneliti, dan penyuluh pertanian, serta aparat pelaksana yang berada di luar pembinaan Departemen Pertanian.

Dari segi fisik pengembangan sumberdaya manusia pertanian dicerminkan oleh peningkatan pendapatan dan daya beli rumah tangga pertanian serta peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi. Hal ini dapat dicapai apabila pertanian mampu meningkatkan pendapatan riil para



pelakunya dan mampu menyediakan pangan yang cukup, semakin beragam, dan berkualitas serta dengan harga yang sesuai dengan daya beli. Apabila hal ini tercapai, maka masyarakat pertanian akan merupakan pasar yang andal baik bagi barang-barang produksi maupun jasa. Pada gilirannya, roda perekonomian pedesaan akan terus berputar secara berkelanjutan.

Dari segi kualitas, pengembangan sumberdaya manusia pertanian dicapai melalui peningkatan daya nalar dan produktivitas kerjanya. Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian ini fokus utama diarahkan pada: (1) peningkatan penguasaan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, (2) penguasaan kualitas keterampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin dan tanggung jawab.

Kebijakan lain adalah meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan, termasuk penyesuaian orientasi program yang mengacu pada peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dengan sistem agribisnis, mengembangkan keterpaduan antar subsistem dan meningkatkan kemampuan perencanaan dan monitoring baik di pusat maupun di daerah. Orientasi program juga perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi-budaya setempat, potensi sumberdaya pertanian, dan potensi pengembangan wilayah.

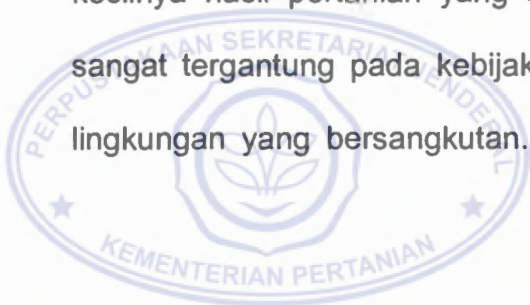
Peningkatan pemanfaatan paket teknologi dan tenaga mekanis berteknologi maju merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian. Penerapan mekanisasi pertanian supaya dilaksanakan secara dinamis dan sesuai dengan kondisi lokasi



spesifik serta dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas dan nyaman serta citra tenaga kerja pertanian. Dengan strategi ini citra sektor pertanian akan dapat diperbaiki dan sekaligus dapat mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian. Perubahan ini disertai dengan perubahan struktural ekonomi pedesaan, akan menghasilkan kondisi dimana secara absolut dan relatif tenaga kerja sektor pertanian menurun akan tetapi citra, kualitas, dan produktivitasnya meningkat.

Dengan adanya keragaman kualitas sumberdaya manusia pertanian, kebijaksanaan dalam penursunan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan harus disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik sumberdaya suatu lokasi dan kubutuhan yang dirasakan bagi pengembangan daerah tersebut. Selain itu rancangan teknologi pertanian yang akan dimasyarakatkan seyogyanya disesuaikan dengan karakteristik wilayah pengembangan baik ditinjau dari agroekologinya maupun sumberdaya manusianya.

Kegiatan pertanian pada hakekatnya adalah suatu upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil-hasil biologik yang diperlukan guna mendukung hidup dan kehidupan manusia. Sumberdaya alam berfungsi sebagai faktor produksi dan sumber kesejahteraan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Besar kecilnya hasil pertanian yang diperoleh pada setiap kurun waktu tertentu sangat tergantung pada kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk mempertahankan

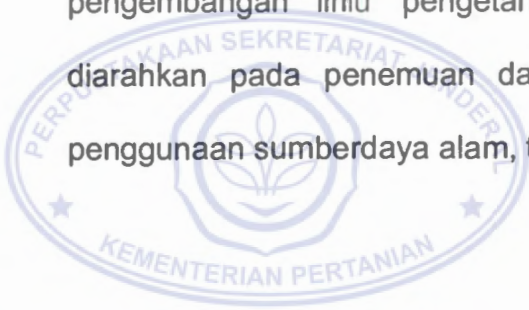


ataupun meningkatkan produksi pertanian, upaya-upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup mutlak harus dilaksanakan. Dengan perkataan lain, pembangunan pertanian haruslah merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Konservasi sumberdaya alam dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup serta biodiversiti merupakan salah satu strategi pembangunan pertanian. Kegiatan pertanian sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumberdaya. Pengelolaan sumberdaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan umat manusia. Karena permintaan terhadap hasil-hasil pertanian meningkat secara berkelanjutan, maka pengelolaan sumberdaya tersebut harus mampu menghasilkan pertumbuhan produksi pada tingkat yang sesuai dengan pertumbuhan permintaan pasar dan pada saat yang bersamaan mampu meningkatkan kapasitas produktif dari sumberdaya tersebut.

Di pihak lain, kegiatan pertanian mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak utama kegiatan pertanian terhadap lingkungan adalah erosi, pencemaran air, degradasi sumberdaya alam pada lahan kering, lahan bermasalah, pantai, perairan darat dan laut, serta perusakan hutan.

Dalam rangka mengembangkan pertanian berwawasan lingkungan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian juga perlu diarahkan pada penemuan dan rekayasa teknologi yang hemat dalam penggunaan sumberdaya alam, tahan terhadap hama dan penyakit, dan tidak



intensif menggunakan bahan kimia. Disamping itu pengendalian hama dan penyakit perlu lebih berorientasi pada pengendalian secara biologis. Dengan strategi pengembangan dan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian ini maka proses produksi pertanian akan dapat berperan positif dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan serta komoditas yang dihasilkan aman bagi kesehatan manusia. Dampak lainnya dari strategi pengembangan teknologi ini adalah merosotnya permintaan dan penggunaan bahan kimia pertanian yang berarti pula menurunnya permintaan energi untuk produksi pertanian. Dalam kaitan tersebut pengembangan pemberantasan hama terpadu (PHT) dan efisiensi pemupukan merupakan kegiatan yang sangat mendukung upaya ini.

Selain itu, peningkatan efisiensi usaha terkait erat dengan kebijaksanaan pembangunan pertanian berwawasan lingkungan. Efisiensi yang ditimbulkan oleh pemanfaatan skala ekonomi dan sistem usaha tani terpadu dapat memanfaatkan sumberdaya sesuai dengan kapasitas dan potensi optimalnya sehingga dapat melestarikan kemampuan produktivitas sumberdaya alam tersebut.

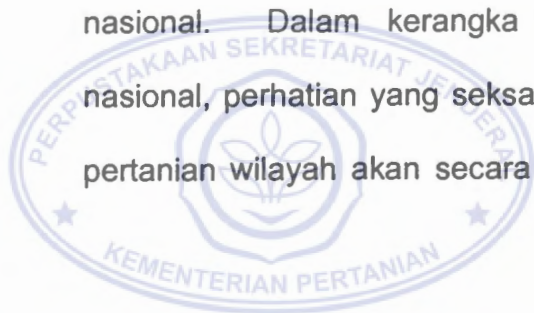
Seringkali dikemukakan bahwa kemiskinan dan rendahnya pengetahuan petani merupakan salah satu penyebab timbulnya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak terkendali oleh penduduk miskin sebenarnya merupakan manifestasi untuk sekedar mempertahankan hidup pada tingkat subsisten. Karena itu keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan



pengetahuan serta pemahaman petani akan pelestarian lingkungan hidup diharapkan dapat mengurangi pemanfaatan sumberdaya alam yang sifatnya eksploitatif.

Dengan adanya bentang alam yang sangat luas, Indonesia mempunyai keragaman antar wilayah dalam sumberdaya, baik macamnya maupun potensi dan kualitasnya. Keragaman iklim dan kandungan sumberdaya hayati sangat besar, Demikian juga dalam hal sumberdaya manusia, terdapat keragaman antar wilayah baik dalam kepadatannya maupun kualitasnya. Karena kondisi yang demikian, pembangunan agribisnis yang berbasiskan pemanfaatan sumberdaya alam seyogyanya dirancang berdasarkan kemampuan dan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah, sehingga optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah guna meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata dapat dicapai dan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan dan saling ketergantungan antar wilayah.

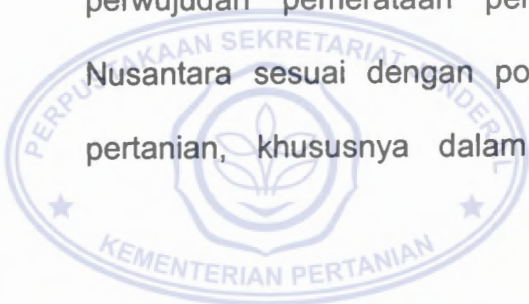
Kebijaksanaan umum pembangunan wilayah pertanian merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan aspek-aspek keseimbangan pertumbuhan antar wilayah, pemerataan antar wilayah serta ketahanan wilayah dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Dalam kerangka keutuhan upaya pembangunan pertanian nasional, perhatian yang seksama dalam perumusan strategi pembangunan pertanian wilayah akan secara seksama memperhatikan keragaman antar



wilayah serta keunikan suatu wilayah tertentu khususnya dalam potensi sumberdaya, agro-ekologi, tingkat perkembangan ekonomi, dan sosial budaya. Karena pembinaan wilayah dilaksanakan berdasarkan batas-batas administratif perlu pula dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Perencanaan pembangunan pertanian wilayah hendaknya dilakukan secara serasi antara perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Perencanaan dari bawah ke atas berarti bahwa unit perencanaan yang paling bawah adalah di daerah otonom tingkat II. Tentunya perencanaan di tingkat daerah otonom ini harus memperhatikan dan dirumuskan berdasarkan kegendak dan kemampuan masyarakat pertanian setempat. Hasil-hasil perencanaan dari tingkat daerah tersebut dipadukan dengan perencanaan pada tingkat nasional dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan sumberdaya secara nasional serta keseimbangan antar wilayah yang kemudian dikembalikan ke daerah untuk dilaksanakan. Sebagai implekasi dari kebijaksanaan seperti ini adalah bahwa tenaga aparat pemerintah baik perencana maupun pelaksana yang berkualitas harus lebih banyak terkonsentrasi di daerah. Strategi ini merupakan perwujudan desentralisasi pembangunan pertanian.

Pelaksanaan pembangunan pertanian dan agribisnis wilayah berarti perwujudan pemerataan pembangunan pertanian di seluruh wilayah Nusantara sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Diversifikasi pertanian, khususnya dalam diversifikasi produksi untuk memperoleh

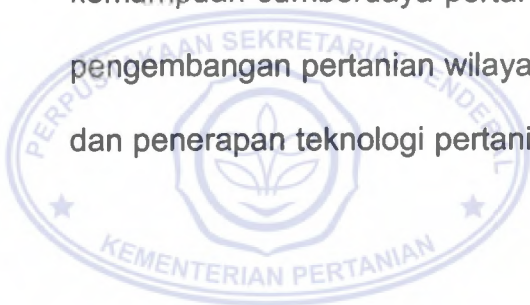


spektrum usaha dan pasar, merupakan konsep dengan lingkup nasional. Pada tingkat wilayah yang lebih kecil, pengembangan produksi ini dilaksanakan sesuai dengan keunggulan komparatif wilayah, sehingga pembangunan pertanian wilayah mengarah pada pengembangan pusat-pusat produksi dengan spesifikasi komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif di setiap wilayah.

Dalam usaha mempercepat pembangunan pertanian dan agribisnis wilayah, hal-hal berikut akan menjadi titik perhatian utama dalam pembangunan pertanian:

- 1) Pembangunan pertanian wilayah ditekankan pada peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian di wilayah, sehingga kesenjangan pendapatan dan taraf hidup rumah tangga antar wilayah dapat diperkecil.
- 2) Pilihan komoditas yang dikembangkan di setiap wilayah mengacu pada keunggulan komparatif wilayah dan peluang pasar, baik pasar lokal, regional, maupun internasional.
- 3) Pilihan pola pengembangan usahatani didasarkan pada kesesuaian potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Upaya-upaya di atas perlu didukung oleh: (1) pengembangan kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah, (2) peningkatan kemampuan sumberdaya pertanian wilayah sesuai dengan potensi dan arah pengembangan pertanian wilayah, (3) pembinaan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian yang sesuai dengan potensi wilayah, dan

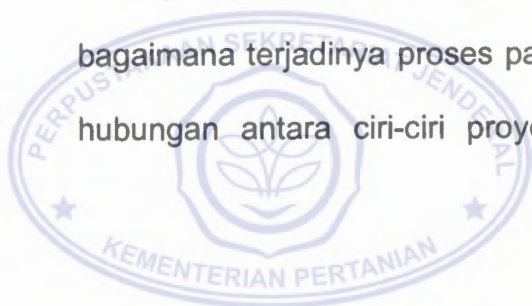


(4) pembangunan prasarana ekonomi yang dapat menunjang percepatan pembangunan pertanian wilayah dan sekaligus meningkatkan keunggulan komparatif wilayah secara berkesinambungan, (5) pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi yang spesifik wilayah bersangkutan.

2.2 Partisipasi

Menurut hasil rumusan FAO (1975) partisipasi didefinisikan sebagai :*"Participation is a process of cooperative action in which a group of individuals share in the responsibilities and consequences of a common understanding or the achievement of a particular task"*. Apabila pengertian partisipasi tersebut dikaitkan dengan pembangunan sistem agribisnis, maka aspek penting dari partisipasi adalah keterlibatan individu-individu dalam suatu kelompok untuk secara bersama-sama bertanggung jawab dalam pembangunan sistem tersebut.

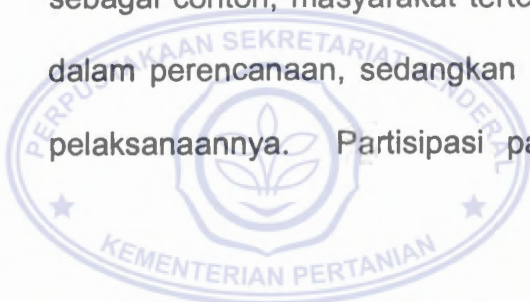
Partisipasi merupakan suatu istilah deskriptif yang mencakup berbagai kegiatan dalam situasi yang beraneka ragam. Partisipasi seringkali dipandang sebagai konsep cakupan yang sebaiknya didekati dengan melihat pada komponen-komponen yang spesifik dan kongkrit. Dalam hal ini perlu dibedakan antara **dimensi** dan **konteks** partisipasi. **Dimensi** partisipasi mencakup jenis partisipasi yang sedang diselenggarakan kelompok-kelompok perorangan yang terkait dalam partisipasi itu dan berbagai cara bagaimana terjadinya proses partisipasi. **Konteks** partisipasi berfokus pada hubungan antara ciri-ciri proyek pembangunan pedesaan dan pola-pola



partisipatif yang ada dalam lingkungan daerah lokasi proyek, termasuk juga lingkungan tugas proyek. Hal ini mendorong untuk mempertahankan ciri-ciri sejarah keadaan lingkungan dan masyarakat yang sering mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pola partisipasi yang muncul dalam suatu usaha pembangunan di pedesaan. Secara lebih jelas dimensi dan konteks partisipasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 3):

Partisipasi masyarakat sangat mutlak diperlukan demi keberhasilan pembangunan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka setiap kegiatan pembangunan akan kurang berhasil. Partisipasi masyarakat, berdasarkan GBHN, diharapkan mencakup tiga hal berikut: (1) partisipasi dalam memikul beban pembangunan, (2) partisipasi dalam pertanggungjawaban hasil pembangunan, (3) partisipasi dalam menerima kembali hasil-hasil pembangunan. Wujud partisipasi tersebut dicirikan oleh sumbangan mereka dalam kegiatan pembangunan baik materi maupun non-materi. Bantuan materi dapat berupa uang, alat/tenaga, sedangkan bantuan non-materi dapat berupa gagasan, atau dukungan moral lainnya.

Partisipasi masyarakat hendaknya dilakukan secara parsial, artinya semua lapisan masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek/program pembangunan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. sebagai contoh, masyarakat tertentu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, sedangkan masyarakat yang lain berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Partisipasi parsial tersebut akan dapat berhasil, jika



disesuaikan dengan peranan yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat tersebut.

Langkah terpenting untuk membangkitkan partisipasi masyarakat adalah: **pertama**, masyarakat harus diberi kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi. Kesempatan tersebut terdiri dari kesempatan untuk ikut menentukan kebijaksanaan pembangunan di tingkat desa/kecamatan; kesempatan untuk ikut melaksanakan rencana pembangunan dan kesempatan untuk menilai sejauh mana pembangunan telah memperbaiki keadaan mereka menurut ukuran dan pengalaman mereka. **Kedua**, kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan itu. **Ketiga**, adanya kemauan untuk berpartisipasi.

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tentu tidak akan datang, apabila masyarakat jauh terasing dari asset, modal, dan keuntungan-keuntungan pembangunan. Namun demikian partisipasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor intern (tingkat pendidikan, status sosial, jumlah tanggungan keluarga) dan faktor ekstern (pengaruh penguasa setempat dan insentif-insentif dari lembaga luar desa).

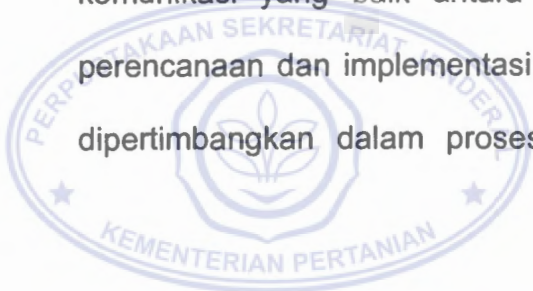
Partisipasi akan tumbuh melalui proses belajar. Partisipasi harus dipelajari dan dilatihkan. Oleh karena itu masyarakat perlu mengalami proses belajar untuk mampu mengetahui kesempatan-kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan seringkali kemampuan dan keterampilan mereka masih perlu ditingkatkan agar dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut.



Berdasarkan uraian di atas, berikut ini diperlihatkan beberapa indikator dari keberadaan partisipasi masyarakat dalam program/proyek pembangunan:

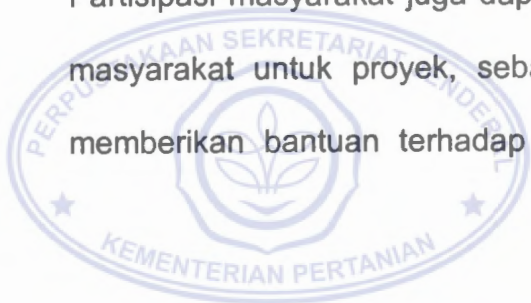
1. Adanya dukungan pemerintah pusat terhadap partisipasi masyarakat.
2. Adanya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dukungan administrasi terhadap proses pengambilan keputusan secara desentralisasi.
3. Adanya pembentukan kelompok-kelompok masyarakat (atau memperkuat institusi yang ada) yang diberi wewenang untuk memberikan saran, pengawasan, dan/atau mengelola suatu proyek.
4. Pemilihan dan pelatihan anggota-anggota masyarakat sebagai staf proyek
5. Adanya kontribusi-kontribusi lain dari masyarakat terhadap sumberdaya proyek.
6. Adanya keterkaitan proyek dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada (seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu, dan lain-lain) dan dengan pelayanan pemerintah yang ada.

Dengan memperhatikan beberapa indikator di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat adalah diperlukan untuk berbagai komponen suatu proyek. Pelaksanaan suatu proyek sebaiknya jangan hanya murni secara "top-down" atau murni secara "bottom-up". Apa yang diperlukan adalah komunikasi yang baik antara semua tingkatan, terutama selama tahap perencanaan dan implementasi awal, sehingga berbagai kepentingan dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Cara tersebut



mungkin membantu dalam mencapai dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan suatu proyek.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan baik pada tahap perencanaan awal, selama pelaksanaan program, dan/atau dalam evaluasi suatu proyek. Walaupun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan sering menimbulkan masalah sehingga kebanyakan proyek hanya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan jangka pendek. Sedangkan perencanaan jangka panjang umumnya masih dilakukan oleh profesional. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi masih merupakan suatu konsep baru. Umumnya suatu proyek hanya melibatkan masyarakat pada tahap implementasi. Suatu cara untuk membangkitkan partisipasi masyarakat pada tahap implementasi adalah melalui pembentukan atau memperkuat kelompok-kelompok masyarakat lokal, dengan wewenang dan tanggung jawab yang mencakup level penasehat sampai pengelola dan pengawas dari proyek tersebut. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai staf proyek atau sebagai tenaga sukarela, penyumbang lahan atau pemberi dukungan dana dan in-kind. Untuk memperkuat struktur partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara mengaitkan kegiatan proyek dengan organisasi masyarakat lainnya. Partisipasi masyarakat juga dapat diperoleh melalui mobilisasi sumber daya masyarakat untuk proyek, sebagai contoh mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan terhadap kegiatan proyek dalam bentuk cash atau



dalam bentuk barang seperti makanan sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan proyek.

Kontribusi masyarakat dalam bentuk sumber daya jika tidak dikaitkan dengan kekuatan pengambil keputusan tidak akan sepenuhnya memperkuat partisipasi masyarakat. Suatu perasaan memiliki yang semakin meningkat terhadap suatu proyek akan memperkuat proses perencanaan dan implementasi dari proyek tersebut dengan tujuan akhir mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan kesinambungan suatu proyek.

Fokus terhadap partisipasi masyarakat secara tidak langsung menunjukkan suatu sistem informasi manajemen dengan feedback informasi terhadap level lokal. Feedback tersebut sama pentingnya dengan monitoring terhadap implementasi itu sendiri. Komunikasi dan pertukaran informasi yang baik diantara semua tingkatan proyek tidak hanya membantu implementasi proyek, tetapi lebih jauh juga membantu mempertahankan ketertarikan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Beberapa keuntungan dari partisipasi masyarakat dalam suatu proyek adalah:

- Meningkatkan perasaan memiliki pada masyarakat terhadap suatu proyek, sehingga menjamin kesinambungan dari proyek tersebut.
- Mengurangi hambatan terhadap inovasi-inovasi proyek, membantu penyebaran informasi, atau meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan proyek.



- Mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah.
- Proyek yang menekankan partisipasi masyarakat, kegiatannya cenderung sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Satu kelemahan utama dari partisipasi masyarakat dalam suatu proyek adalah peningkatan kompleksitas administrasi. Jika partisipasi masyarakat dikembangkan pada tahap perencanaan, dapat menimbulkan konflik antara “tujuan program” dengan “tujuan masyarakat”. Keadaan tersebut jika tidak diantisipasi dengan baik dapat menghambat usaha-usaha pencapaian tujuan program, Karena itu perlu dipertimbangkan cara untuk menyelaraskan partisipasi masyarakat dengan tujuan proyek dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga mereka menyadari pentingnya tujuan proyek tersebut.

Pengukuran partisipasi masyarakat belum secara metodologi didefinisikan. Beberapa proyek mengkuantifikasikan jumlah sumber daya yang dikontribusikan oleh masyarakat terhadap kegiatan proyek sebagai indikator keterlibatan masyarakat. Kadang-kadang partisipasi masyarakat diukur sebagai partisipasi dalam kegiatan proyek (misalnya kehadiran, keikutsertaan dalam kegiatan, dan lain-lain).



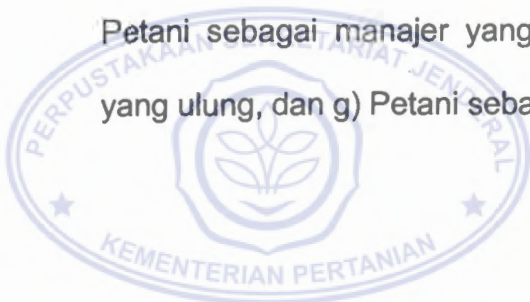
BAB III

PENDEKATAN MODEL FARMER-CENTERED AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT (FARM) PROGRAM

Program Farmer-centred Agricultural Resource Management (FARM) dalam mengimplementasikan kegiatannya menggunakan beberapa mekanisme pendekatan, yaitu: 1) Farmer-centred Development, 2) Participatory Approaches; 3) Interactive Planning, 4) Gender Sencitivity, 5) Farmers Management and Entrepreneurial Capacity, 6) Multidiciplinary and Multisectoral, 7) Alleviates Proverty, 8) Sustainability on agriculture and Rural Development, dan 9) Ensures Resource Management, Conservation and Protection of the Environment. Secara rinci, pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Farmer-centred Development

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghantarkan petani sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian yang dimilikinya. Hal ini diharapkan dapat membawa petani kepada perannya yang sejati, yaitu : a) Petani tahu aktivitas pekerjaan yang harus dikerjakannya, b) Petani dapat belajar dari keadaan, potensi dan proses yang terjadi disekitarnya, c) Petani dapat melakukan penelitian, percobaan dan demontrasi usaha-taninya, d) Petani sebagai pelatih yang baik, e) Petani sebagai manajer yang baik, f) Petani merupakan wirausahawan yang ulung, dan g) Petani sebagai pembuat keputusan yang baik.

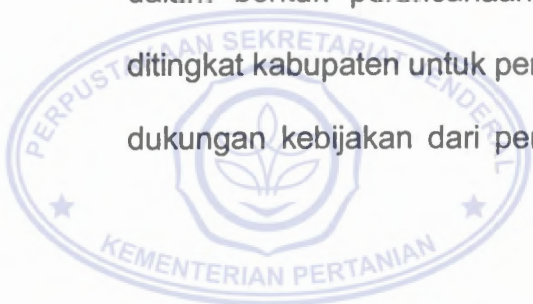


2. Participatory Approach

Pendekatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranserta masyarakat tani secara aktif dan spontan dalam pengembangan pengelolaan sumberdaya pertanian dan desanya secara bersama-sama. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri, rasa memiliki dan motivasi petani. Partisipasi yang tergalang dengan baik dalam masyarakat pedesaan, akan mampu menciptakan kegiatan besar yang mandiri dan dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga diharapkan bergulirnya roda partisipasi ini akan mendorong proses pembangunan pertanian dan pedesaan secara simultan.

3. Interactive Planning

Pendekatan perencanaan yang dilakukan dalam program FARM ini merupakan harmonisasi dan keterpaduan aspirasi dari masyarakat (bottom-up) dan kebijakan global yang telah digariskan pihak pemerintahan (Top-down). Keselarasan model pendekatan perencanaan ini akan mewujudkan kegiatan yang teintegrasi antar komponen penentu, efektif dan efisien dalam proses pembangunan pertanian dan pedesaan berkelanjutan. Perencanaan interaktif ini diformulasikan oleh masyarakat tani pedesaan dengan proses Participatory Assessment and Planning (PAP) yang mengakumulasi keinginan dan potensi masyarakat tani dalam bentuk perencanaan swadaya, selanjutnya dipresentasikan dan ditingkat kabupaten untuk penyelarasan penyempurnaan dan mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan nasional serta program



Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, pengusaha dan tokoh masyarakat.

4. Gender Sencitivity

Pendekatan ini diharapkan dapat membangun pemahaman dan proses saling mengisi serta keharmonisan antara kaum pria dan wanita dalam pengembangan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya melalui pengelolaan sumberdaya pertanian yang dimilikinya.

5. Farmers Management and Entrepreneurial Capacity

Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun masyarakat tani pedesaan dalam kemampuan kepemimpinan, sistem informasi dan keorganisasian dan jiwa kewirausahaan serta menciptakan pasar.

6. Multidiciplinary and Multisectoral

Pendekatan ini dimaksudkan untuk membawa berbagai disiplin keilmuan, teknologi dan sektor yang terkait ketengah masyarakat tani dalam mendorong pengembangan potensi sekaligus memecahkan masalah yang dihadapi secara terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat membawa kemajuan pada masyarakat tani secara profesional dan efisien.

7. Poverty Alleviation

Pendekatan FARM ini dimaksudkan untuk mengupayakan masyarakat tani keluar dari kesengsaraan hidup diri dan keluarganya melalui kegiatan produktif dalam pengelolaan sumberdaya pertanian yang dimilikinya secara berkelompok. Pendekatan FARM ini diharapkan pada akhirnya dapat



mengangkat kesejahteraan masyarakat tani melalui peningkatan pendapatan.

8. Sustainability on Agriculture and Rural Development

Pendekatan ini dimaksudkan untuk membentuk masyarakat tani yang mempunyai pola pengelolaan usahatani yang bersifat produktif dan memiliki orientasi bisnis dengan tetap menjaga keseimbangan potensi alamnya. Pengelolaan usaha tani oleh masyarakat merupakan dasar pengembangan dan pertumbuhan wilayah desanya secara bersama-sama.

9. Ensures resource Management, Conservation and Protection of the Environment

Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan model pengelolaan sumberdaya pertanian yang bersifat lokal spesifik untuk masing-masing daerah yang akan dikembangkannya dengan tetap memperhatikan konservasi dan perlindungan alam. Pendekatan ini diharapkan dapat menopang kesinambungan pengelolaan usaha tani oleh masyarakat di desanya.



BAB IV

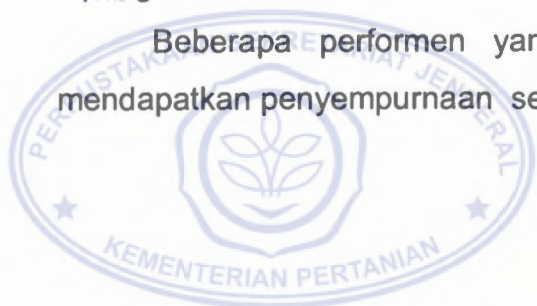
KAJIAN MODEL AGRIBISNIS

Model-model pengembangan agribisnis pedesaan yang disajikan ini merupakan pengalaman lapangan yang telah dan sedang diimplementasikan sejak tahun 1996 melalui pendekatan FARM Program dan rencana model yang akan diimplementasikan di beberapa lokasi binaan.

Model agribisnis yang disajikan pada kesempatan ini merupakan aktivitas agribisnis dalam penyiapan input, produksi, pengolahan dan pemasaran serta upaya peningkatan kemampuan para pelaku agribisnis pedesaan. Kegiatan yang tampak menonjol adalah munculnya peran aktif dan kepioniran para pelaku agribisnis dalam kelompok masyarakat yang mendapatkan mediasi dan fasilitasi terbatas melalui pendekatan Program FARM. Sentuhan hanya dilakukan secara sederhana pada simpul-simpull tertentu dalam kelompok masyarakat binaan oleh fasilitator dan tenaga ahli yang terlibat dalam Program FARM. Aktifitas yang digambarkan kelompok merupakan akumulasi motivasi dan kemampuan anggota masyarakat dalam menata dirinya melakukan upaya perbaikan pendapatan, teknologi dan kelembagaan serta status sosialnya dihadapan masyarakat lainnya.

Sejalan dengan era otonomi daerah, pendekatan pengembangan masyarakat agribisnis pedesaan melalui pendekatan FARM didasarkan satuan wilayah administratif dengan keterlibatan secara dini dan penuh unsur pembina, tokoh masyarakat dan struktur pemerintahan setempat. Sehingga pemilikan, pengelolaan dan replikasi program sepenuhnya berada di tingkat lapangan.

Beberapa performen yang diharapkan dapat direplikasikan dan mendapatkan penyempurnaan sesuai keadaan spesifik daerah untuk model



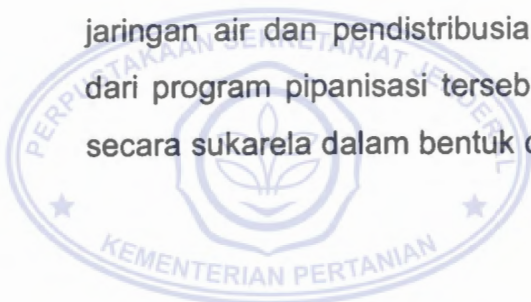
pengembangan agribisnis pedesaan, antara lain ditunjukkan oleh kegiatan : Kelompok Kerja lapang (site working group/SWG) Desa Pinggan, SWG Desa Megulung, SWG Desa Jadi, SWG Desa Mlati Rejo, SWG Desa Pasar Bangi di Kabupaten Rembang; P4S Pasir Roko dan SWG Desa Sudamanik di Kabupaten Lebak; Kawasan Pengembangan Agribisnis Itik dan Kambing Losari di Kabupaten Cirebon; dan rencana pengembangan kawasan pembibitan Rajagalah di Kabupaten Majalengka.

1. Model Penyediaan Air Pedesaan (SWG Desa Pinggan-Kabupaten Rembang).

Air merupakan satu komponen utama dalam Subsistem Agribisnis Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi. Ketersediaannya secara tetap untuk Desa Pinggan telah dicermati Kelompok Kerja FARM Desa Pinggan melalui perencanaan partisipatif bersama masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan/mendorong dinamika agribisnis dan kesejahteraan.

Kebutuhan masyarakat Desa Pinggan akan tersedianya air telah direspon oleh Kelompok Kerja Desa Pinggan dalam perencanaan partisipatif bersama masyarakat pada penyelenggaraan "*Participatory Assesment and Planning (PAP) Exercise*". Anggota Kelompok sebanyak 30 orang telah melakukan penilaian (*assesment*) sumber daya alam dan manusia melalui beberapa alat bantu penelitian *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dan *Rapid Rural Appraisal (RRA)*. Satu hal yang dirasakan penting untuk ditindaklanjuti adalah adanya mata air berjarak 3 km dari Desa (gunung) dan Kebutuhan permanen masyarakat akan air.

Kondisi ini membutuhkan satu perencanaan program berupa pipanisasi jaringan air dan pendistribusiannya dengan panjang 3 km. Implementasi dari program pipanisasi tersebut, telah mendorong keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam bentuk dana, material, tenaga dan moril. Kegiatan ini

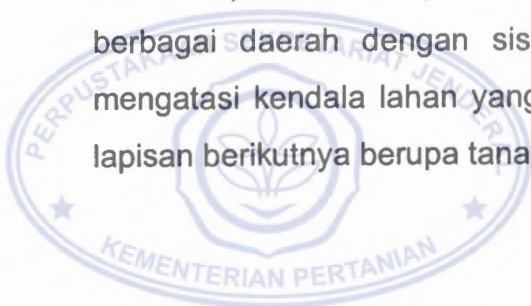


dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan, mulai dari sosialisasi program, pengumpulan dana dan material, pembuatan jaringan pipa sejauh 3 km, pembuatan bak penampung serta jaringan distribusi. Dalam pelaksanaannya, program ini dikomandoi oleh Kepala Desa dengan bimbingan Kelompok Kerja FARM. Sumber daya dan dana yang dikeluarkan berasal dari masyarakat, dan hanya sedikit dana cash yang dipinjam dari "Dana Abadi Desa"; yang pada waktu selanjutnya pinjaman dana tersebut dikembalikan melalui restribusi bulanan masyarakat.

Prasarana pertanian ini telah membawa kehidupan agribisnis yang lebih dinamis dan positif bagi masyarakat Desa Pinggan, karena ketersediaan air ini telah mendorong aktivitas ternak kecil (ayam, itik) dan besar (sapi, kambing, dan lain-lain), pembibitan tanaman buah-buahan (kebun Bibit Desa) dan pertanian hortikultura (dalam areal terbatas). Prasarana ini dikelola oleh kelompok kerja FARM dalam pemeliharaan jaringan pipa, pengaturan distribusi dan pengelolaan dana distribusi dari masyarakat. Inisiatif, implementasi dan pengelolaan prasarana jaringan pipa air oleh masyarakat Desa Pinggan telah membawa manfaat dan nuansa baru dalam aktivitas sub sistem agribisnis pengadaan dan penyaluran input produksi berkelanjutan di tingkat pedesaan. Pertemuan dilakukan kelompok secara rutin oleh kelompok.

2. Model Kebun Bibit Desa (SWG Desa Pinggan-Kabupaten Rembang)

Pada dua dasawarsa kebelakang, Desa Pinggan merupakan daerah marjinal yang sangat miskin tanaman tahunan. Seorang tokoh tani 'Maryono' merintis penanaman jenis tanaman buah-buahan yang berasal dari berbagai daerah dengan sistim 'pot'. Sistim pot ini digunakan untuk mengatasi kendala lahan yang memiliki lapisan olah (top soil) tipis dengan lapisan berikutnya berupa tanah cadas. Keberhasilan tahap awal



dilanjutkan dengan usaha pembuatan bibit sendiri melalui teknik okulasi dan cangkok di lahan miliknya. Bibit yang telah siap tanam dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan dan sebagian lagi dijualnya keluar daerah. Dalam dua dasawarsa tersebut, telah tampak hasil produksi beberapa jenis buah-buahan di Desa Pinggan yang telah mendorong dinamika masyarakat dalam melakukan agribisnis. 'Maryono' sebagai ketua Kelompok Kerja FARM Desa Pinggan dan anggota kelompoknya beserta masyarakat, telah mencanangkan satu kegiatan yang direncanakan secara partisipatif pada PAP Exercise berupa 'kebun bibit desa' dalam menyediakan bibit tanaman secara mandiri untuk kebutuhan desa dan menjualnya secara komersial ke daerah lainnya.

Kebun bibit desa ditempatkan pada lahan bengkok desa dan di tanah 'maryono'. Pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh kelompok, mulai dari penyiapan dan pengolahan lahan, perbaikan embung kecil di lahan bengkok desa, penyiapan seedling beberapa jenis tanaman buah-buahan dan tanaman penghijauan, pemeliharaan, melakukan okulasi dan pencangkokan. Begitu pula untuk kegiatan pemasaran dan pencatatan hasil penjualan serta pengelolaan modal usaha dilakukan oleh kelompok.

'Kebun Bibit Desa' ini juga dapat digunakan pihak pemerintahan daerah dan lembaga lainnya yang memiliki anggaran pembibitan dalam menyiapkan bibit untuk kepentingan proyek atau yang akan disebarluaskan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat. Satu diantara kegiatan yang telah dilakukan adalah adanya bantuan benih/biji sengon, plastik dan biaya pemeliharaan dari Kantor Kehutanan untuk program penghijauan desa.

Pengelolaan 'Kebun Bibit Desa' ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dalam mendorong kemauan menanam, meningkatkan aktifitas usahatani (khususnya pada musin kemarau) dan meningkatkan pendapatan.



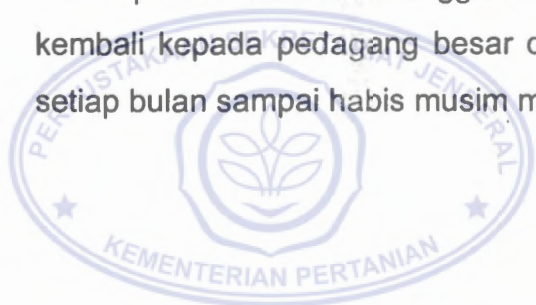
3. Model Pemupukan Modal “Dana Abadi Desa” (SWG Pinggan-Kabupaten Rembang)

Pemupukan modal kelompok agribisnis dengan model ‘Dana Abadi Desa’ ini adalah inovasi Kelompok Kerja FARM pada PAP Exercise yang merupakan akumulasi pengalaman kelompok dalam mengelola tabungan dengan program pemerintah dalam menyalurkan dana bergulir /revolving fund.

Dana Abadi Desa dikelola oleh kelompok dalam bentuk *simpan pinjam* dan *modal usaha produktif*. *Simpan pinjam* dimaksudkan untuk membantu anggota untuk kebutuhan - kebutuhan mendesak dan dalam jangka pendek dengan aturan main seperti koperasi. Masyarakat biasanya menggunakan jasa simpan pinjam ini untuk kebutuhan pendidikan dan konsumtif keluarga dalam jumlah terbatas. *Modal usaha produktif* dapat digunakan oleh anggota kelompok secara perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha-usaha produktif (terutama pada kegiatan agribisnis) setelah mengajukan usulan kegiatan dan disetujui tim khusus dari kepengurusan kelompok. Peminjaman paling lama selama 6 bulan (satu musim tanam) dan memiliki aturan pengembalian yang telah disepakati seluruh anggota kelompok. Beberapa contoh diantaranya adalah :

Peminjaman dana sebesar 2 juta rupiah untuk mendukung kegiatan pipanisasi pengadaan air bersih. Dana tersebut dikembalikan secara bertahap dari hasil retribusi air oleh anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa air bersih tersebut secara berkelanjutan.

Peminjaman dana oleh beberapa anggota kelompok dalam melakukan usaha pembelian buah mangga dari masyarakat pada saat panen dan dijual kembali kepada pedagang besar di Lasem. Pengembalian uang dilakukan setiap bulan sampai habis musim mangga.



Seorang anggota memanfaatkan pinjaman untuk melakukan usahatani semangka dikebun yang dimilikinya. Pengembalian pinjaman dilakukan secara keseluruhan setelah penjualan hasil panen.

Model 'Dana Abadi Desa' ini mendapatkan sumber pemupukan modal dari hasil/jasa simpan pinjam, hasil dari peminjaman modal usaha produktif, sumbangan dana bergulir Program FARM, sumbangan pemerintah daerah, suber-sumber dana lainnya. Dana ini dikelola oleh kelompok kerja FARM dengan pemantauan dari Kepala Desa Pinggan

Manfaat yang telah dirasakan masyarakat adalah : tersedianya dana terbatas untuk modal usaha pertanian dan usaha lainnya yang menguntungkan; tersedianya dana terbatas untuk memenuhi kebutuhan mendesak; dan dapat digunakan untuk investasi yang akan menguntungkan masyarakat dan dikembalikan dalam bentuk retribusi. Manfaat tidak langsung yang didapat oleh masyarakat adalah munculnya kegiatan komunal yang berorientasi bisnis (khususnya dibidang pertanian) dan meningkatnya partisipasi pasyarakat dalam berbagai kegiatan lainnya.

4. Model Pengelolaan Embung (SWG Desa Megulung-Kabupaten Rembang)

Kondisi alam Desa Megulung yang mengandalkan air hujan, memiliki berbagai keterbatasan pada masyarakat dalam melakukan aktivitas agribisnis, sosial dan kegiatan lainnya. Kehidupan penduduk sangat tampak pada musim hujan, namun terjadi penurunan yang drastis pada musim kemarau. Inisiatif masyarakat untuk dapat keluar dari masalah permanen ini dicetuskan pada perencanaan partisipatif Kelompok kerja FARM, Desa Megulung beserta masyarakat berupa rencana kegiatan pembuatan dan pendalaman Embung Desa yang telah ada, saat dilaksanakannya PAP Exer-



cise. Inisiatif kelompok ini muncul setelah menilai sumberdaya yang dimiliki dan kesulitan.

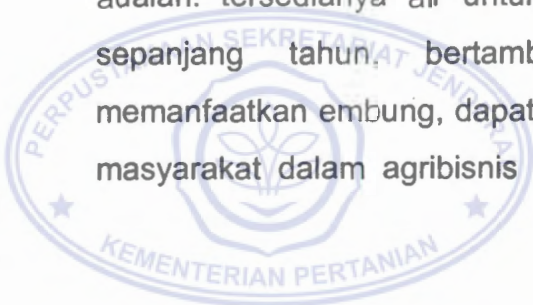
Keinginan masyarakat untuk keluar dari masalah air, dimana hal ini sering berdampak pada : a) lumpuhnya ternak besar (khususnya sapi), b) kurang tersedianya air minum, c) kurang termanfaatkannya air yang turun pada musim hujan, dan d) tidak tersedianya air pertanian pada musim kemarau.

Implementasi dari program pembuatan dan pendalaman Embung ini dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dengan bimbingan Kelompok Kerja FARM serta Kepala Desa yang bertindak sebagai pemegang komando Pendalaman Embung berukuran 20 m X 30 m sedalam 2 m selama 1 bulan oleh masyarakat menggunakan sistem pembagian area garapan dan pembagian tugas.

Setiap dukuh / kelompok menggarap lahan berukuran 10 m X 15 m dengan kedalaman 2 m secara bersaing dengan kelompok lainnya. Sehingga setiap harinya dapat dilihat perkembangan hasil yang dicapai oleh masing-masing kelompok. Peran ibu-ibu dalam menyiapkan makan anggota keluarganya tidak kalah pentingnya. Akhirnya dalam kurun waktu satu bulan menjelang musim hujan, embung tersebut dapat diselesaikan secara swadana.

Terbentuknya embung merupakan aktivitas partisipatif masyarakat dalam sub sistem agribisnis pengadaan dan penyaluran input produksi. Hal ini juga mendorong terbentuknya kelompok pemelihara embung yang mengadakan pertemuan mingguan dan pengelolaan secara rutin.

Manfaat tersedianya input produksi ini bagi masyarakat antara lain adalah: tersedianya air untuk aktivitas agribisnis ternak besar dan kecil sepanjang tahun, bertambah aktivitas perikanan darat dengan memanfaatkan embung, dapat dimanfaatkannya air Embung untuk sebagian masyarakat dalam agribisnis tanaman pangan jangka pendek (khususnya



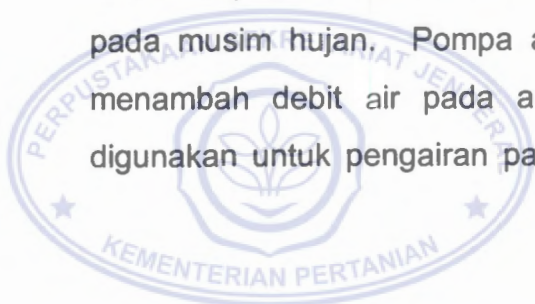
kacang hijau) sehingga petani merasakan program ini sangat menunjang aktivitas agribisnis di Desa Megulung khususnya selama musim kemarau secara berkelanjutan.

5. Model Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (SWG Desa Mlati Rejo-Kabuapten Rembang)

Menyadari akan keterbatasan tenaga kerja untuk pengolahan lahan dalam waktu pendek dan terbatasnya air pertanian, kelompok kerja FARM Desa Mlati Rejo dalam perencanaan partisipatif pada PAP Exercise (diselenggarakan oleh pengurus Kelompok Kerja FARM Desa Pinggan dalam upaya mereplikasi Program FARM ke desa terdekat) mencermati hal tersebut dalam bentuk program kerja kelompok untuk mengelola Hand Traktor dan Pompa Air. Melalui bantuan FAO, kedua alat pertanian ini dapat diadakan dan pengelolaannya dilakukan oleh kelompok kerja FARM dengan cara sewa dan jasa pengolahan. Kepala Desa Mlati Rejo melakukan pemantauan langsung terhadap pengelolaan mesin ini.

Hand traktor digunakan untuk mengolah lahan dengan jasa sebesar Rp. 300.000 s/d 400.000 per hektar, dimana kelompok menyiapkan bahan bakar dan tenaga operator. Hand traktor ini dioperasionalkan untuk lahan kering dan sawah. Satu hektar lahan biasanya diselesaikan dalam 3-5 hari. Usaha pengelolaan Hand Traktor ini sangat menarik terutama pada masa pengolahan tanah, setelah itu dilakukan pemeliharaan sampai tiba musim berikutnya.

Pengelolaan pompa air bagi kelompok cukup memberikan masukan, terutama pada musim kemarau dan terjadinya keterlambatan turun hujan pada musim hujan. Pompa air ini biasanya digunakan untuk membantu menambah debit air pada areal pertanaman padi dan terkadang juga digunakan untuk pengairan pada tanaman hortikultura (seperti semangka).



Pompa ini biasanya disewakan harian pada anggota dan masyarakat dengan bahan bakarnya, sedangkan tenaga operasional tidak disiapkan secara khusus mengingat mesin ini mudah dioperasikan. Pompa air ini hampir digunakan sepanjang tahunnya.

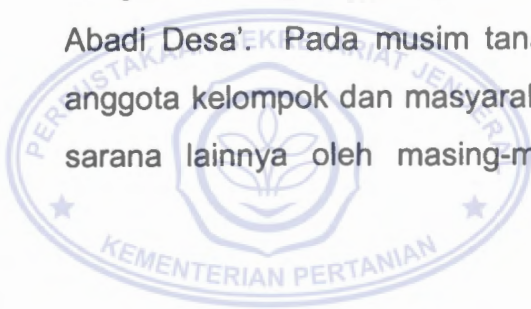
Masyarakat banyak mengambil manfaat dari pengelolaan jasa alat dan mesin pertanian oleh kelompok untuk pengolahan lahan dan tersedianya air pertanian. Kelompok mendapatkan masukan dana untuk menambah tabungan kelompok dan pemeliharaan mesin. Pengelolaan keuangan dalam model 'Dana Abadi Desa'.

6. Model Penyediaan dan Penyaluran Pupuk (SWG Desa Jadi-Kabupaten Rembang)

Introduksi teknologi pemupukan tanaman oleh penyuluh pertanian lapang (PPL) telah direspon dengan baik oleh masyarakat tani Desa Jadi. Hal ini didasarkan pada hasil panen yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Kondisi demikian meningkatkan kebutuhan pupuk untuk tiap musim tanam, namun disisi lain masyarakat tani kurang menyiapkan dana tunai untuk pengadaan pupuk tersebut.

Keadaan masyarakat tani di atas, dicermati oleh Kelompok Kerja FARM Desa Jadi dengan perencanaan partisipatif yang dibuat bersama masyarakat pada PAP Exercise (diselenggarakan oleh Pengurus Kelompok Kerja FARM Desa Megulung dalam rangka replikasi program pada desa terdekat) dalam bentuk kegiatan 'Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian'.

Implementasi dari pengelolaan sarana produksi pertanian ini dilakukan dengan dukungan tabungan kelompok dan modal usaha produktif 'Dana Abadi Desa'. Pada musim tanam awal telah tersedia sebagian kebutuhan anggota kelompok dan masyarakat sesuai dengan usulan jumlah pupuk dan sarana lainnya oleh masing-masing. Pengelola membeli pupuk pada



pedagang besar dengan dana tunai, sehingga harga pada tingkat petani dapat diterima dengan harga normal. Adapun sistim pembayaran oleh anggota kelompok dan masyarakat dilakukan setelah penjualan hasil panen (YARNEN) dengan tambahan jasa untuk kepentingan pengelolaan.

Pengadaan sarana produksi pertanian (khususnya pupuk) ini dilakukan secara rutin dari musim tanam ke musim tanam berikutnya oleh kelompok kerja FARM Desa Jadi dengan pemantauan dari Kepala Desa.

Model ini dirasakan bermanfaat bagi masyarakat dalam mempermudah tersedianya pupuk untuk kebutuhan tanam dan dapat dibayar setelah panen dengan tambahan jasa yang sangat rendah berdasarkan kesepakatan kelompok. Bagi kelompok, kegiatan ini merupakan suatu peluang masukan dana kelompok dan terserapnya beberapa tenaga kerja pada saat-saat tertentu.

7. Model Pengolahan Hasil Perikanan Laut (Kelompok Wanita Desa Pasar Bangi-Kabupaten Rembang)

Wanita nelayan sebagai tumpuan keluarga sekaligus anggota masyarakat pada perkampungan nelayan tergugah untuk berkiprah lebih jauh dalam mencari solusi terhadap permasalahan hasil tangkapan yang terkadang tidak terjual karena harga rendah dan telah menjadi sampah (busuk). Dalam wadah kelompok wanita nelayan Desa Pasar Bangi , para pengurus dan anggota kelompok secara partisipatif memunculkan program untuk melakukan usaha pengolahan hasil tangkapan ikan laut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah dan meningkatkan peran ekonomi wanita nelayan sebagai salah satu tumpuan keluarga. Dalam aktivitas sehari-hari, kelompok ini dikelola oleh pengurus dengan bimbingan dan pemantauan Kepala desa pasir Bangi.



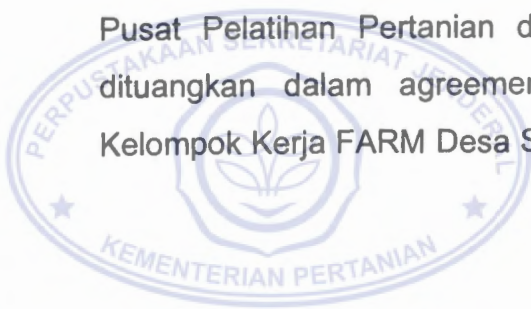
Model agribisnis pengolahan hasil perikanan laut ditengah-tengah nelayan oleh ibu-ibu nelayan sangat mulia. Hal ini memberikan peran naluriah wanita untuk melakukan proses pengolahan yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan kecermatan. Peran nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan, ditindak-lanjuti dengan pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah sekaligus mengurangi terjadinya sampah karena pembusukan ikan. Kelompok ini pun dapat membantu pemasaran hasil, baik dalam bentuk segar maupun olahan kepada para pedagang besar atau konsumen langsung disekitar Kabupaten Rembang dan daerah-daerah lainnya.

Kegiatan pengolahan oleh anggota kelompok sebanyak 30 orang ini antara lain menghasilkan : terasi, ikan asin dan teri nasi. Aktivitas kelompok ini lebih meningkat dengan sentuhan partisipatif program FARM dan adanya dukungan dana tambahan dari FAO melalui Telefood Fund untuk pengadaan mesin/alat pengering, blender dan pengadaan bahan olahan. Model ini diharapkan dapat dikembangkan pada kawasan-kawasan nelayan dengan berbagai produk spesifik.

8. Model Kemitraan Usaha pada Agribisnis Cabe Kriting (P4S Pasir Roko-Kabupaten Lebak)

Model kemitraan bisnis antara perusahaan swasta yang memiliki kapital, kelompok kerja FARM Desa Sudamanik yang dalam P4S Pasir Rokok yang memiliki fasilitas fisik dan tehnologi memiliki tenaga SDM dalam agribisnis cabe kriting, sangat menarik pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam pengembangan masyarakat pedesaan berbasis pertanian.

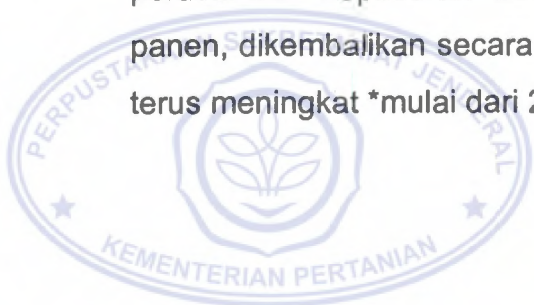
Pola kemitraan dalam usahatani cabe kriting seluas 7 hektar dilokasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Pasiri Roko, dituangkan dalam agreement yang ditandatangani pihak perusahaan, Kelompok Kerja FARM Desa Sudamanik dan diketuai oleh Bupati Kabupaten



Lebak. Pihak perusahaan, mempunyai kewajiban menyiapkan dana untuk pengolahan tanah, bibit, pemeliharaan dan pembimbing tehnik, kelompok tani menyiapkan tenaga kerja dan lahan (yang dipinjamkan melalui P4S Pasiri Roko), dan pemerintah daerah mendorong secara moril dan fasilitas/infrastruktur yang ada disekitar lokasi. Hasil usaha dibagi atas dasar dibagi hasil 60% untuk petani dan 40% untuk perusahaan setelah dikurangi biaya produksi.

Dalam pelatihan tehnik dilapangan, aktivitas kemitraan diimplementasikan dalam bentuk :

1. Tiap petani/anggota kelompok kerja FARM Sudamanik diberi tanggung jawab untuk mengelola lahan seluas 2000 M2. Sehingga total petani yang terlibat dalam agribisnis cabe kriting dalam hamparan seluas 7 ha adalah 35 orang.
2. Pihak perusahaan menyelenggarakan pelatihan tehnik budidaya cabe kriting untuk anggota kelompok tani pada tahap awal kegiatan. Selanjutnya setiap anggota kelompok dimonitor dan dibimbing oleh pembina tehnik lapang yang ditugaskan perusahaan selama melakukan kegiatan.
3. Pembina lapangan ini diambil dari tenaga dari tenaga pengalaman dalam budidaya cabe merah dan dari penyuluh pelatihan menguasai bidang ini. Pembina lapangan ini digaji oleh perusahaan.
4. Panen dilakukan oleh petani dengan pengawasan pembina lapang. Hasil panen ini dikumpulkan dan dihitung untuk masing-masing petani. Panen dilakukan secara bertahap selama 45 hari (6 kali panen).
5. Pemasaran dilakukan bersama antara ketua kelompok dan pihak perusahaan kepasar bebas. Hasil pemasaran untuk setiap tahap panen, dikembalikan secara bertahap pada petani dengan proporsi yang terus meningkat *mulai dari 20%).



Model kemitraan ini sangat baik untuk diperhatikan terutama dalam memadukan potensi mengeliminir keterbatasan sekaligus masing-masing pihak dalam melakukan agribisnis ditingkat pedesaan. Dalam pelaksanaannya, model kemitraan ini memiliki kendala besar dari harga cabe kriting yang sangat murah pada saat itu dan pihak perusahaan tidak memberikan wadah pemasaran.

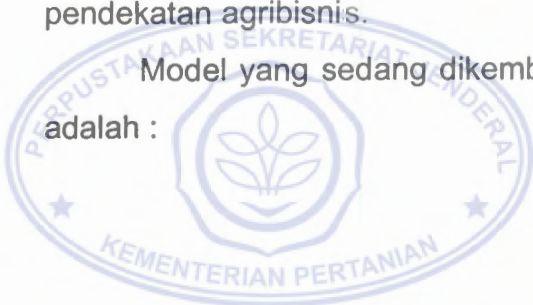
Petani mendapatkan kemajuan dalam pengusahaan teknologi budidaya cabe kriting melalui pelatihan awal, pembinaan dari pembimbing lapang dan pelaksanaan kegiatan oleh petani sendiri. Namun secara material kurang menguntungkan karena harga jual dibawah nilai BEP.

9. Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Itik (Kelompok Ternak Itik Losari-Kabupaten Cirebon)

Model pengembangan agribisnis ini didasarkan atas pendekatan komoditas, kawasan dan keterpaduan, yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat pedesaan.

Pendekatan Komoditas untuk ternak itik di ambil karena kondisi lokasi secara teknis dan ekonomis sangat mendukung pengembangan untuk areal yang lebih luas. Itik telah terbukti dapat meningkatkan pendapatan dan teknologinya mudah diserap masyarakat. Sedangkan pendekatan kawasan dilakukan karena lokasi ini secara spesifik mendukung pengelolaan itik dengan sistem semi intensif oleh masyarakat, dan strategis untuk melakukan pemasaran dalam areal yang lebih luas. Sedangkan pendekatan terpadu mengingat keseluruhan pada kawasan ini, serta adanya keterpaduan antara aktivitas fisik bisnis dengan penyiapan sumber Daya manusia sebagai pendekatan agribisnis.

Model yang sedang dikembangkan Kelompok ternak itik di tempat ini adalah :



1. Melakukan kegiatan agribisnis mulai dari menyiapkan pakan, breeding, produksi dan pengolahan.
2. Pengelolaan kawasan pemasaran produk itik.
3. Pendirian Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Itik.

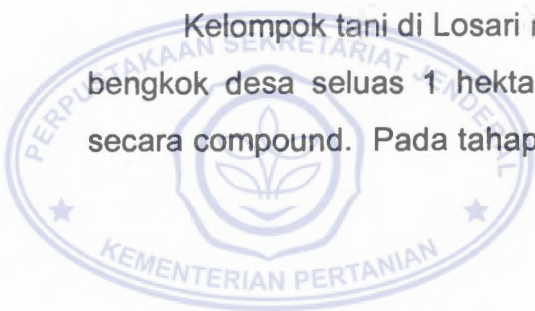
Kelompok yang dipimpin H. Yusin yang beranggotakan 60 orang peternak itik, sedang berusaha mengembangkan pola bisnisnya dengan cara memperkuat pola pengelolaan pakan lokal; memperbaharui sistem breeding dengan alat sederhana yang dapat dioperasikan oleh petani; peningkatan kemampuan teknis petani dalam pembesaran dan produksi telur; serta pengolahan telur, daging dan produk sampingan dari itik sebagai makanan dan cinderamata.

Program lain yang mendapat dukungan pemerintah daerah adalah pembuatan Kawasan Pemasaran Produk Itik di tepi jalan raya Losari. Dalam kawasan pasar ini akan dipasarkan berbagai produk itik, berupa : Telur dan daging segar, telur dan daging olahan, cendramata dari produk sampingan itik, restoran dengan menu masakan itik dan produk lainnya.

Guna mendukung dan menyiapkan kemampuan para pelaku agribisnis itik, kelompok mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) dalam breeding itik. Kegiatan akan berupa pelatihan teknis budidaya dan breeding itik, teknologi makanan olahan, kerajinan tangan produk sampingan dari itik, manajemen pengembangan kelompok, pemasaran dan materi lainnya.

10. Model Agribisnis Kambing Sistem Compound (Kelompok Ternak Kambing Losari-Kabupaten Cirebon)

Kelompok tani di Losari membuat inisiatif dalam memanfaatkan lahan bengkok desa seluas 1 hektar dengan aktifitas agribisnis ternak kambing secara compound. Pada tahap awal lahan bengkok tersebut dibagi atas dua



fungsi, yaitu : seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ digunakan untuk kawasan perkandangan dan seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ digunakan untuk kawasan pertanaman rumput. Kawasan perkandangan dibangun secara mandiri oleh masing-masing anggota kelompok (49 anggota) untuk luasan dan letak lokasi yang telah disepakati bersama. Kelompok mendapat tambahan dukungan dana usahatani pengadaan kambing dari Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K). Sedangkan pengelolaan kawasan pertanaman rumput dilakukan secara bersama oleh semua anggota kelompok , baik dalam pengolahan tanah, penanaman bibit, pemeliharaan dan pemanenan.

Pengelolaan ternak kambing ditempat ini digolongkan atas dua tipe, yaitu: penggemukan (fattening) dan breeding. 15 anggota kelompok melakukan usaha breeding untuk dijual anak-anak kambingnya pada usia diatas 6 bulan kepada anggota kelompok lainnya atau keluar lingkungan. Sedangkan 35 orang anggota lainnya melakukan usaha penggemukan. Pemasaran dilakukan oleh kelompok kepasar luar sepengetahuan memiliki (terutama menyangkut harga). Kelompok mengambil 5 % dari hasil penjualan untuk pemeliharaan kesehatan ternak dan pembinaan kelompok.

Pada saat ini pengelolaan kawasan pertanaman rumput telah berkembang dengan menyewa lahan disebelahnya seluas 1 hektar lagi. Pemasaran juga dilakukan secara reguler pada para pedagang besar untuk memasok penjual sate dan untuk keperluan qurban untuk daerah Cirebon.

11. Model Agribisnis Jamur (Kelompok Wanita Tani Ciawi-Kabupaten Bogor)

Kelompok wanita tani Ciawi yang berada diantara perkotaan dan daerah wisata, mencoba memunculkan inovasi kegiatan dalam upaya memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang relatif sempit untuk mendapatkan nilai tambah melalui kegiatan agribisnis jamur.

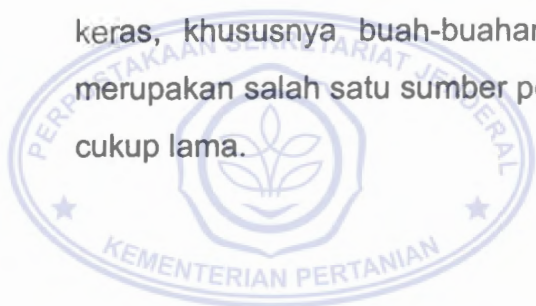
Model kegiatan pengembangan yang dilakukan adalah dengan membagi anggota kelompoknya sebanyak 25 orang kedalam 5 sub kelompok. Masing-masing sub kelompok pada saat awal mengelola sebuah rumah jamur berukuran rata-rata 6 m x 10 m. Pengelolaan rumah jamur ini dilakukan secara mandiri dengan peran aktif setiap anggota mulai dari persiapan, pembuatan rumah jamur, penempatan bibit, pemeliharaan, pemanenan dan pengeringan. Selanjutnya hasil panen kering dari masing-masing sub kelompok dihitung dan dipasarkan oleh pengurus kelompok. Secara teknis, telah dilakukan beberapa kali pelatihan budidaya dan pengolahan jamur kuping serta dilakukan bimbingan teknis kepada masing-masing sub kelompok rumah jamur.

Kesulitan dalam pemasaran jamur kering pada saat yang lalu telah mendorong inisiatif kelompok untuk melakukan upaya pemasaran bahan olahan berupa : kerupuk jamur dengan berbagai rasa, abon jamur, sup dan kimlo jamur instan dan produk olahan lainnya. Kesulitan pemasaran ini pun telah membuahkan inisiatif untuk mendirikan Koperasi Pengusaha dan Petani Jamu Indonesia (KOPPJI), dimana pada saat ini telah berbadan hukum.

Pengembangan model agribisnis lahan sempit dengan komoditas komersial ini mendapat dukungan dana Telefood Fund dari FAO.

12. Model Pengembangan Agribisnis Pembibitan (Kelompok Usaha Raja Galuh-Kabupaten Majalengka)

Raja Galuh yang berada dikaki Gunung Ciremai memiliki iklim dan kondisi alam yang sangat mendukung tumbuhnya berbagai jenis tanaman keras, khususnya buah-buahan. Usaha pembibitan secara perorangan merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat yang telah berjalan cukup lama.



Model agribisnis bibit tanaman secara komunal dalam suatu kelompok hampan masyarakat merupakan inovasi yang sedang dikembangkan kelompok usahatani guna meningkatkan kualitas, menurunkan biaya operasional, membangun jaringan pemasaran sekaligus mendorong dinamika masyarakat dalam menjalankan agribisnis ditingkat pedesaan.

Kelompok Agribisnis Bibit Raja Galuh ini merupakan kelembagaan masyarakat yang dikelola oleh suatu kepengurusan atas kesepakatan anggota. Kelompok ini melakukan aktifitas penyiapan prasarana dan input produksi yang dibutuhkan anggota untuk pembibitan; koleksi dan pencarian bahan tanaman unggul; penanaman dan pemeliharaan seedling; melakukan pencangkokan, okulasi dan teknik grafting lainnya; pemeliharaan dan pemasaran bibit; serta perkuatan kelembagaan kelompok dan jaringan pemasaran.

Kegiatan pembibitan dilakukan oleh masing-masing anggota dengan bimbingan teknis dari anggota yang berpengalaman. Sedangkan untuk pemasaran, sebagian dilakukan dengan bantuan kelompok dan sebagian bibit lainnya dipasarkan sendiri oleh anggota. Saat ini pemerintahan daerah mencermati adanya kios-kios bibit dan buah untuk kelompok ini dalam suatu lokasi pemasaran.

Guna mendukung proses pengalihan teknologi dan peningkatan kemampuan manajerial secara berkelanjutan untuk pengurus, anggota dan masyarakat, kelompok sedang merintis berdirinya *Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Bibit Tanaman*. Di tempat ini nantinya diharapkan dapat selenggarakan berbagai program pelatihan teknis, keterampilan dan manjerial yang berkaitan dengan agribisnis pembibitan. Sehingga para pelaku bisnis bibit ini akan semakin menunjukan profesionalismenya dari waktu ke waktu.



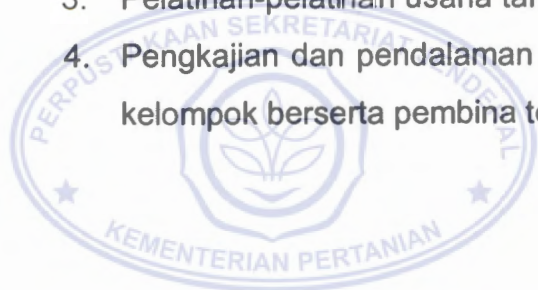
13. Model Pusat Pendidikan Agribisnis Pedesaan Swadaya Pasir Roko-Kabupaten Lebak

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Pasir Roko merupakan suatu lembaga pedesaan partisipatif yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan teknis dan manajerial para pelaku agribisnis pedesaan di Kabupaten Lebak. Fungsi pusat pendidikan masyarakat ini adalah sebagai lembaga **pendidikan** dan **penelitian** pedesaan yang dimiliki, dikelola dan dikembangkan oleh kelompok tani/kelompok agribisnis pedesaan. Pemerintah daerah hanya berperan dalam memotivasi, mediasi dan memfasilitasi pengembangan pusat pelatihan masyarakat ini.

Pusat pelatihan agribisnis ini memiliki lahan praktek seluas 10 hektar dan fasilitas lain berupa dormitori, tempat pertemuan, sarana ibadah, listrik dan air bersih.

Kegiatan yang telah dan sedang dijalankan sejak tahun 1997 antara lain :

1. Pelatihan-pelatihan manjerial dan administratif , seperti : Participatory Assessment and Planning (PAP) Exercise, Perkoperasian dan Book keeping, Dinamika dan Kepemimpinan Kelompok dan Kelembagaan Tani.
2. Pelatihan-pelatihan teknis, seperti : Budidaya komoditas Jamur, Cabe, Semangka dan komoditas lainnya; teknik perbanyak vegetative tanaman buah-buahan; pengolahan nata de coco; pembuatan pupuk organik; pembuatan tempe dan makanan olahan fermentasi; pengembangan kedele plus (inikulasi ryzobium).
3. Pelatihan-pelatihan usaha tani dan pengelolaan Dana Abadi Desa.
4. Pengkajian dan pendalaman materi-materi 'indigenous technology' oleh kelompok berserta pembina teknis.



5. Penelitian oleh kelompok kerja FARM Desa Sudamanik dan Sukamarga untuk aplikasi pupuk berimbang pada komoditas jagung; uji coba berbagai tanaman rempah dan obat.
6. Pengelolaan agribisnis semangka (2 hektar), ikan lele dumbo (4 kolam) dan kerjasama kemitraan dengan perusahaan swasta untuk komoditas cabe keriting.
7. Pertemuan-pertemuan kelompok petani, pertemuan kelompok dengan instansi terkait dan pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

Sejak tahun 1997, pengembangan model ini dibantu oleh Program Farmer-centred Agricultural Resource management (FARM)-FAO dengan dukungan beberapa departemen teknis terkait. Model pengembangan pusat pendidikan agribisnis ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis, manajemen dan penelitian para pelaku agribisnis oleh masyarakat pedesaan sendiri. Model ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantuan masyarakat pada dana-dana pemerintah / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



BAB V

PERKUATAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PEDESAAN PARTISIPATIF

Dari hasil kajian model-model pengembangan agribisnis yang telah berjalan di pedesaan atas bantuan teknik dan dana luar negeri pada beberapa program/proyek, dapat dianalisis satu hal yang perlu mendapatkan perkuatan khusus dalam menopang kebijakan nasional pertanian untuk pengembangan sistem agribisnis dan ketahanan pangan yaitu: **kelembagaan agribisnis pedesaan partisipatif**. Hal ini merupakan salah satu pengejawantahan dari pedoman umum dalam penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, sebagai berikut :

'Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pamarfaatan sumberdaya alam'.

Pertanian sebagai bagian sistem perekonomian nasional dan global harus berorientasi pada mekanisme pasar. Hal ini menuntut munculnya sosok pertanian modern berkelanjutan yang mampu mengembangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam berdasarkan potensi spesifik wilayah. Salah satu kebijakan yang sangat mendesak diperlukan saat ini adalah percepatan rekayasa kelembagaan pertanian dalam upaya untuk mengimbangi kecepatan tumbuh dan berkembangnya agroindustri, terutama dalam menangkap sinyal-sinyal pasar. Sehingga rekayasa ini dapat meretribusi manfaat ekonomi yang timbul sebagai akibat peningkatan partisipasi masyarakat. Satu bagian besar dari rekayasa kelembagaan ini adalah pengembangan kelembagaan agribisnis pedesaan. Tujuan dari pengembangan kelembagaan agribisnis pedesaan ini adalah :



1. Meningkatkan ketersediaan dan produktivitas pangan ditingkat rumah tangga/household.
2. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan usaha pertanian dengan wawasan agribisnis.
3. Mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih efisien.
4. Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada masyarakat pedesaan.

Pengembangan kelembagaan agribisnis pedesaan ini sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi petani dalam melakukan usahatani yang berkarakter bisnis untuk mendapatkan nilai tambah dan finansial yang berkelanjutan dengan mengusahakan pemanfaatan proses biologik dari tumbuhan dan hewan guna menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan pasar. Sehingga pelaku agribisnis dapat mengamalkan 'nilai instrumental' dalam usahanya berupa: produktivitas, konsistensi, disiplin, lugas, efisiensi, hemat, professional, optimal, luwes, dinamik dan ketepatan (guna, cara, jumlah, waktu, tempat dan harga). Struktur pertanian di Indonesia mendorong sistem agribisnis berada di dan menjadi bagian dari masyarakat pedesaan.

Pembinaan dalam pengembangan kelembagaan agribisnis pedesaan di tingkat nasional perlu dilakukan secara periodik dan terstruktur oleh Departemen Pertanian, pemerintah daerah beserta kelompok profesional agribisnis. Departemen Pertanian diharapkan dapat menyiapkan kebijakan makro pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan melalui bimbingan kelembagaan, pengkajian sosial dan ekonomi, penelitian dan transfer/alih teknologi serta dukungan jaringan informasi dan prasarana pemasaran. Departemen Pertanian juga diharapkan dapat membangun keharmonisan dengan Kelompok Profesional Agribisnis untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kelompok-kelompok agribisnis pedesaan dalam menjalankan



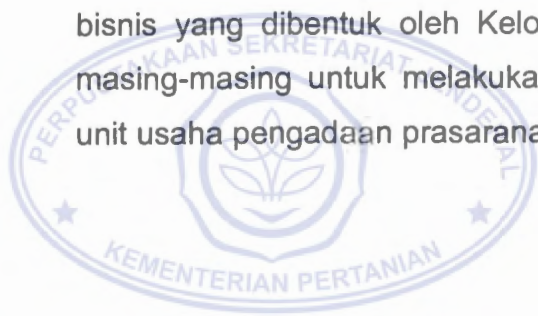
usahatani, serta melakukan kemitraan secara nasional dan internasional untuk mendorong pemasaran produk pertanian.

Struktur sistem pengembangan kelembagaan agribisnis pedesaan akan terdiri dari sub sistem dan jaringan kelembagaan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (Lampiran 1).

Sejalan dengan perguliran arus globalisasi dan otonomi daerah, rekayasa pengembangan kelembagaan ini akan difokuskan pada penguatan lembaga **Kelompok Agribisnis** (ditingkat kecamatan) dan **Unit Usahatani Pedesaan** (tingkat desa); dan institusi penopang (*stakeholder*) berupa lembaga pelayanan informasi agribisnis, lembaga penelitian pedesaan, lembaga pelatihan agribisnis swadaya, lembaga perkreditan dan perbankan, lembaga asuransi pertanian dan terminal/sub terminal agribisnis (ditingkat kabupaten).

1. Kelompok Agribisnis dan Unit Usahatani Pedesaan

Fokus dari perkuatan kelembagaan agribisnis pedesaan partisipatif adalah terbentuknya Kelompok-kelompok Agribisnis ditingkat Kecamatan dan lahirnya unit-unit otonom usahatani pedesaan didesa-desa dibawah Kelompok Agribisnis. **Kelompok Agribisnis** merupakan wadah agribisnis masyarakat tingkat Kecamatan atau hamparan usahatani yang dibentuk berdasarkan inisiatif dan partisipasi masyarakat yang memiliki keinginan sejalan dalam meningkatkan nilai usahatani. Kelompok ini melakukan usaha pengadaan sarana produksi, produksi, prosesing dan pemasaran komoditas pertanian unggulan dan yang dibutuhkan masyarakat didaerah ini dan untuk kegunaan perdagangan umum. Peran pemerintah, swasta dan lembaga lainnya hanya merupakan mediator, fasilitator dan motivator yang bersifat partnership. **Unit Usahatani Pedesaan** merupakan unit otonom bisnis yang dibentuk oleh Kelompok Agribisnis berdasarkan potensi desa masing-masing untuk melakukan usahatani. Unit usahatani dapat berupa unit usaha pengadaan prasarana produksi, produksi dan atau prosesing yang

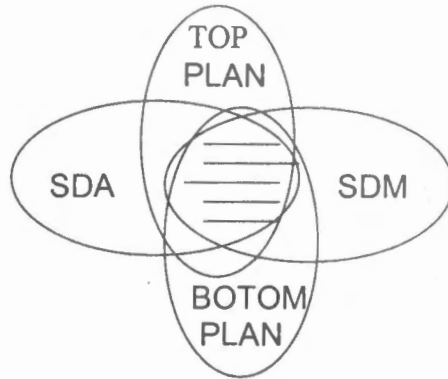


diselenggarakan ditingkat desa. Pemasaran keluar wilayah Kelompok Agribisnis (kecamatan) dilakukan oleh Kelompok (bukan unit usahatani). Unit ini dapat dibentuk dan atau dikaitkan dengan kelompok-kelompok tani yang telah ada didesa tersebut.

Kelompok Agribisnis ini mengemban amanah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan berkelanjutan (Sustainable Agriculture and Rural Development/SARD) dengan peran :

- a. Meningkatkan kemampuan **administratif** dan **manajerial** kelompok dan unit-unit usahatannya melalui **group dynamic and leadership**.
- b. Meningkatkan kemampuan **teknis** dan **teknologis** para pelaku agribisnis melalui berbagai **training**.
- c. Meningkatkan kemampuan **inovasi, daya nalar dan pengelolaan sumberdaya pertanian** (alam dan manusia) yang ada didaerah sekitarnya melalui **research**.
- d. Meningkatkan kemampuan **entrepreneurship** melalui **pola pendampingan wirausaha** .
- e. Peningkatan **produksi** dan **produktivitas** komoditas pertanian melalui program **intensifikasi** dan **ekstensifikasi**.
- f. Peningkatan kemampuan **pengolahan hasil (processing)** pertanian melalui introduksi **teknologi** dan **prasarana** pengolahan.
- g. Peningkatan **modal usaha** melalui mobilisasi **tabungan** kelompok dan **kemitraan** usaha.
- h. Peningkatan **perencanaan partisipatif berkelanjutan** melalui **interactive approach** (Gambar 1).





Keterangan :

SDM : Sumber Daya Manusia

SDA : Sumber Daya Alam

Gambar 1. Interactive Approach

2. Lembaga Pelayanan Informasi Agribisnis

Lembaga ini menyiapkan informasi teknis dan pasar sebagai dasar pertimbangan para pelaku agribisnis dalam mengambil sikap dan tindakan yang tepat. Lembaga ini merupakan institusi pemerintah yang diperkaya dengan peran partisipatif para pelaku agribisnis profesional ditingkat kabupaten, untuk membina pengembangan kelembagaan /kelompok agribisnis; termasuk memfasilitasi kemitraaan usaha dan pemasaran. Lembaga ini merupakan refungsionalisasi dari Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP).

Lembaga Pelayanan Informasi Agribisnis terkecil berada ditingkat kecamatan, berupa *Unit Pelayanan Agribisnis* yang merupakan refungsionalisasi dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Unit Pelayanan Agribisnis ini juga mengemban tugas dari stakeholder lain dari tingkat kabupaten yaitu institusi/unit penelitian agribisnis pedesaan (didalam struktur BAPPEDA).



3. Lembaga/Unit Penelitian Agribisnis Pedesaan

Lembaga/Unit Penelitian Agribisnis Pedesaan ini merupakan salah satu bagian/unit dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berfungsi untuk melakukan pengkajian dan pengembangan teknis serta pendukung teknis dalam pembangunan pertanian dan pedesaan berkelanjutan di kabupaten tersebut. Lembaga ini juga melakukan pengujian teknologi lokal spesifik dan pendalaman *indigenous technology*.

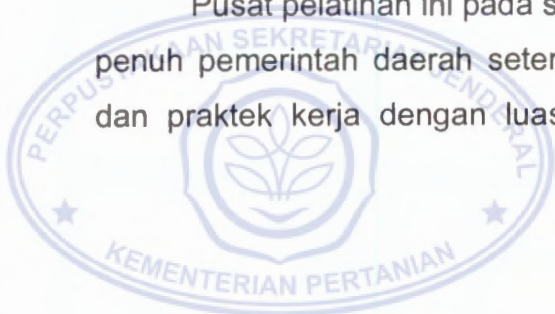
Lembaga/Unit Penelitian Agribisnis Pedesaan mendapat pembinaan fungsional dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di tingkat propinsi dan pusat-pusat penelitian pertanian dan pedesaan dari departemen terkait.

Guna mendukung pelayanan teknis pada *Kelompok Agribisnis*, unit penelitian ini melakukan perannya ditingkat kecamatan melalui / didalam wadah Unit Pelayanan Agribisnis (sebagaimana dijelaskan di atas). Unit ini merupakan institusi pemerintah yang memerankan para pelaku agribisnis ditingkat kecamatan dalam aktifitas penelitian, pembinaan kelembagaan, informasi teknis dan pasar).

4. Pusat Pelatihan Agribisnis Swadaya

Lembaga Pelatihan Agribisnis Swadaya ini dibentuk dan dikelola oleh *paguyuban kelompok agribisnis* ditingkat kabupaten. Lembaga pelatihan ini berfungsi dalam meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, reseach dan entrepreneurship secara khusus bagi para pelaku agribisnis pada masing-masing kelompok, perorangan atau institusi pemerintah. Lembaga ini merupakan penggabungan konsep 'Rembug Harian Kontak Tani Nelayan Andalan' dan 'Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya'.

Pusat pelatihan ini pada saat awal diharapkan mendapatkan dukungan penuh pemerintah daerah setempat agar memiliki lahan untuk perkantoran dan praktek kerja dengan luasan minimal 5 hektar (disesuaikan dengan



ketersediaan lahan yang dapat disiapkan pemerintah daerah dengan memperhitungkan kebutuhan minimal usahatani yang dapat membiayai operasional pusat pelatihan), fasilitas penunjang pelatihan serta biaya operasional. Dalam kurun waktu tertentu, pusat pelatihan ini diharapkan dapat berdiri sendiri dari hasil pengelolaan pendidikan dan pemanfaatan hasil produksi dari lahan yang dimiliki. Pada gilirannya Pusat Pelatihan Agribisnis Pedesaan ini dapat membantu pemerintah secara swadaya dalam menyiapkan tenaga-tenaga profesional agribisnis pedesaan yang akan menjadi penggerak ekonomi rakyat melalui produk dan olahan komoditas pertanian.

5. Lembaga Perkereditan dan atau Perbankan

Keadaan lembaga perekonomian pedesaan saat ini pada umumnya menghadapi keterbatasan permodalan. Keberadaan lembaga perkereditan dan atau perbankan agribisnis ditingkat kabupaten / kodya diharapkan dapat mendorong/mendukung permodalan kelompok-kelompok agribisnis yang ada didaerah tersebut untuk melakukan dan mengembangkan usahanya.

Lembaga pendukung dana masyarakat ini dapat berbentuk lembaga perkereditan dan atau perbankan agribisnis yang merupakan keterpaduan kekuatan finansial pemerintah, swasta dan sumber dana lainnya. Lembaga ini juga mengemban misi dalam pengelolaan kredit pemerintah dan dana bergulir pada masyarakat pertanian Indonesia. Sedangkan wujud lembaga ini dapat berupa *lembaga perkereditan dan atau perbankan pemerintah, swasta penuh atau BUMN daerah setempat*.

6. Lembaga Asuransi Pertanian

Guna mengurangi resiko usahatani dilapangan karena faktor alam, pemerintah beserta pihak swasta diharapkan dapat meluncurkan bisnis jasa asuransi agribisnis sampai ke tingkat kabupaten/kodya. Sehingga kelompok-



kelompok agribisnis dapat terpacu melakukan percepatan usahatani dengan menurunkan kehilangan modal akibat resiko kegagalan dilapangan. Pada tahap awal, pemerintah perlu melakukan intervensi dan pengalokasian dana subsidi khusus untuk mendukung asuransi agribisnis di Indonesia.

7. Terminal/sub terminal Agribisnis

Untuk mendorong dan memperlancar pemasaran komoditas pertanian yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok agribisnis di suatu daerah, pemerintah daerah bersama pihak swasta diharapkan dapat memfasilitasi terbentuknya terminal / sub terminal agribisnis ditingkat kabupaten/kodya. Fungsi dari terminal ini adalah untuk memperlancar penyaluran produk pertanian yang dibutuhkan masyarakat kabupaten/kodya tersebut dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Untuk terminal agribisnis dengan produk unggulan khusus di suatu daerah, pemasaran dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan/pasokan ekspor.

Untuk pengelolaan terminal/sub terminal agribisnis ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercayakan pengelolaannya pada swasta dan atau BUMN daerah dengan dukungan fasilitas dan berbagai kemudahan.

8. Unit Pelayanan Agribisnis

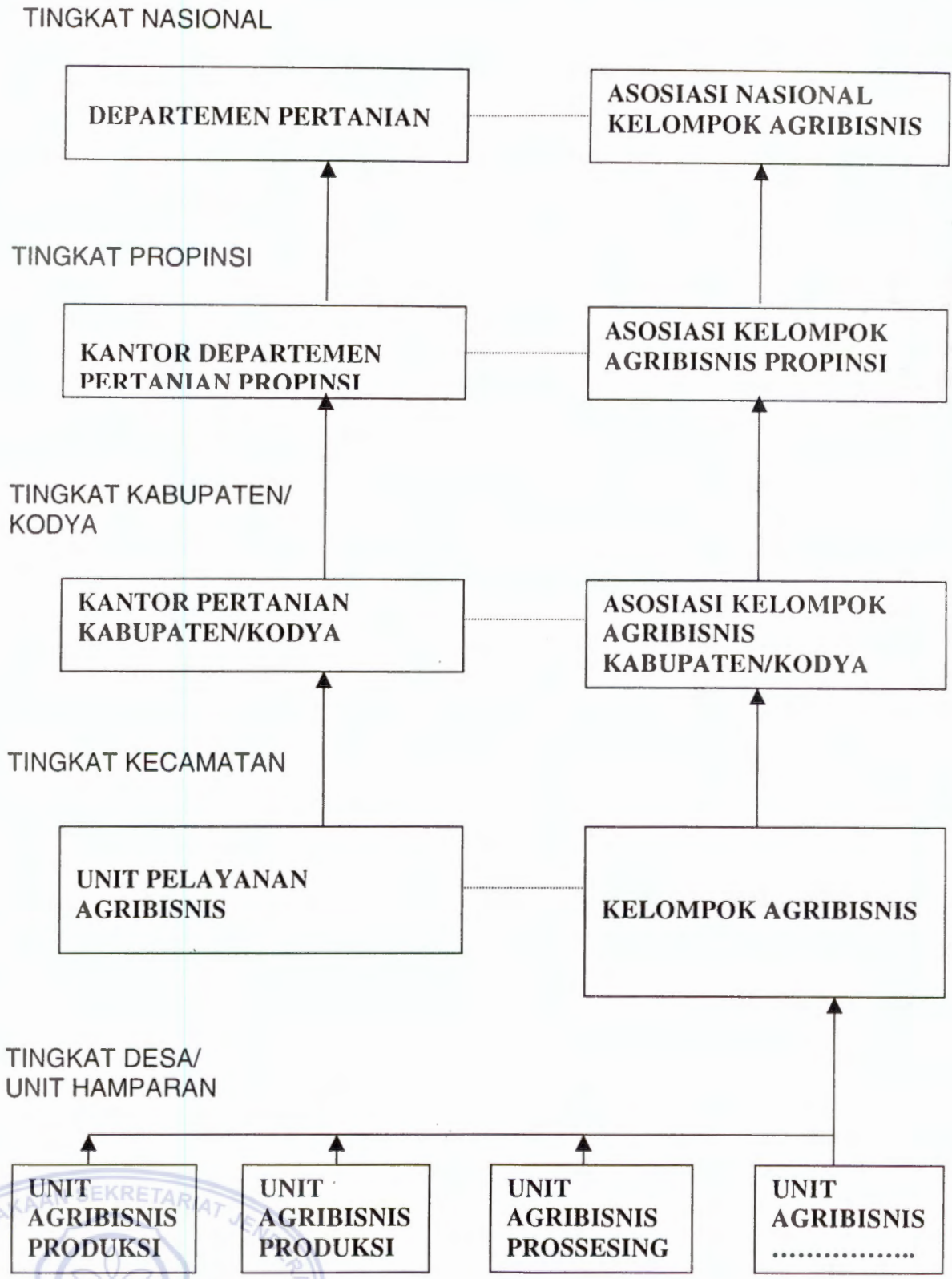
Unit Pelayanan Agribisnis merupakan satuan terkecil institusi pemerintah ditingkat kecamatan yang berperan dalam mendukung sepenuhnya pengembangan kelompok agribisnis. Unit ini merupakan refungsionalisasi dari Balai Penyuluhan Pertanian, yang mempunyai peran : penyiapan database agribisnis, informasi teknologi dan pasar, penelitian, pelatihan dan pendampingan wirausaha ditingkat kecamatan (sebagaimana telah dijelaskan pada masing-masing poin di atas).



DAFTAR PUSTAKA

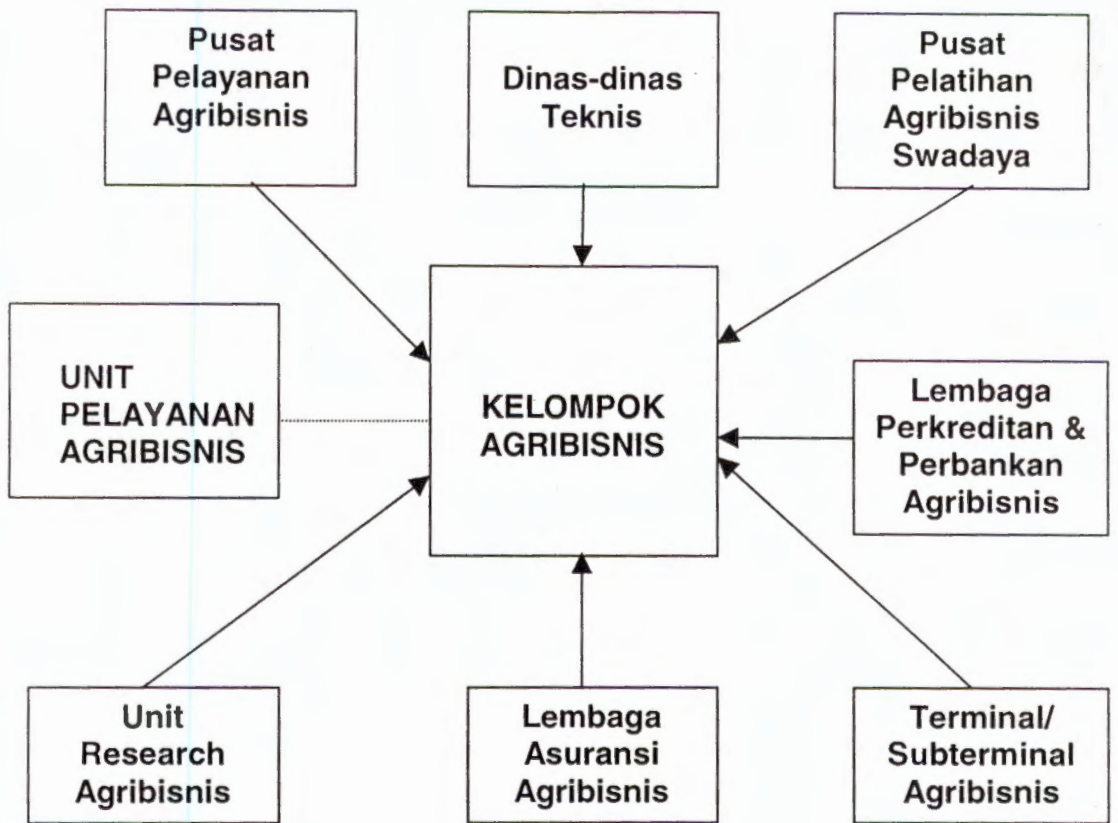
- Drillon, J.D. 1971, Introduction to Agribisnis Management Asian Productivity Organization, Tokyo.
- FAO 1975, Seminar on the Rule of Women in Integrated Rural Development with Emphasis on Polpulation Problem, Rome
- Slamet, M. 1980. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan LPM IPB, Bogor.
- Slamet, M. 1980. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan LP3ES, Jakarta.
- Soeharyo, A. 1990. Kumpulan Makalah Agribisnis ; Buku I Lab. Agribisnis Jurusan SOSEK IPB, Bogor.
- Stepheus, A. 1988. Participatory, Monitoring and Evaluation; Handbook for Training Field Warkers, Bangkok
- Swasono, E. 1988. Perencanaan Pembangunan , BAPPENAS, Jakarta.





Lampiran 1. Struktur Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Pedesaan





Lampiran 2. Kelembagaan Kelompok Agribisnis (Kecamatan) dan Stakeholdernya (Kabupaten)



